

IIS MONOGRAPH SERIES #9

DAMAI PANGKAL DAMAI

# TIDAK BAIK-BAIK SAJA

REFLEKSI PERLAWANAN NIRKEKERASAN  
DI INDONESIA DAN DUNIA 2024

2808-5221

# Damai Pangkal Damai:

## Tidak Baik-Baik Saja

### *Refleksi Perlawanan Nirkekerasan di Indonesia dan Dunia 2024*

#### **Penulis:**

Diah Kusumaningrum  
Dhanial Salsha Handiani  
Daniel Petz  
Huibert Oldenhuis  
Chayanit Poonyarat

#### **Editor:**

Diah Kusumaningrum

#### **Peneliti dan Enumerator Pangkalan Data:**

Ayu Diasti Rahmawati, Daniel Petz, Diah Kusumaningrum, Novi Kurnia, Aditya Wibowo, Ainur Rohmah, Caecilia Galih Krisnhamurti, Coory Yohana Pakpahan, Dhanial Salsha Handiani, Husna Yuni Wulansari, Ilham Dary, Inas Mufidatul Insiyiroh, Imas Indra Hapsari, Ganesh Cintika Putri, Grace Lolona, Kanaya Ratu Aprillia, Ken Ayu Galuh Satiti, Melinda Gularso, Mira Ardhya Paramastri, Nandita Putri, Naomi Resti Anditya, Nabila Auliani Ruray, Sartika Pradhani, Selma Theofany, Taradhinta Suryandari, Verena Widanti, Wahyuwidi Cinthya, Yuda Rashadian

#### **Tata Letak:**

M. Furqon

#### **Ilustrator:**

Rievaya Snyezana Putri, M. Furqon

#### **Manajemen:**

Ganesh Cintika Putri (2016-2017), Caecilia Galih Krisnhamurti, Taradhinta Suryandari, Angganararas Indriyosanti (2018), Coory Yohana Pakpahan (2019), Sri Handayani Nasution, Dhanial Salsha Handiani, Kanaya Ratu Aprillia (2020), Alifa Ardhya (2021), Dhanial Salsha Handiani, Kanaya Ratu Aprillia (2022), Dhanial Salsha Handiani (2023-2024)

---

© Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

---

ISSN 2808-5221

---

Diterbitkan oleh:

2025 Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada

Alamat Penerbit:

Jl. Sosio Yustisia 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

iis.fisipol@ugm.ac.id

Petunjuk Pengutipan:

Kusumaningrum, D., Handiani, D. S., Petz, D., Oldenhuis, H., & Poonyarat, C. (2025). *Tidak Baik-Baik Saja: Refleksi Perlawanan Nirkekerasan di Indonesia dan Dunia 2024 [Monograph]*, No 9/2025, Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Indonesia. [ugm.id/IISMonograph9](http://ugm.id/IISMonograph9).

#### **Terima kasih kepada:**

alm. Samsu Rizal Panggabean, alm. Chaiwat Satha-Anand, Aghniadi, Arie Rostika Utami, Charles Butcher, Christopher Shay, Erica Chenoweth, Ihsan Ali-Fauzi, Jacky Manuputty, Jamila Raqib, Janjira Sombatpoonsiri, Joned Suryatmoko, Luqman-nul Hakim, Maulida Raviola, Melissa Kowara, Michael Beer, Nabilah Nur Abiyanti, Nisrina Nadhifah Rahman, Puri Kencana Putri, Sana Jaffrey, Tiffany Easthom, Treviliana Eka Putri, Veronique Dudouet, and Zainal Abidin Bagir.

Damai Pangkal Damai (DPD) adalah proyek pangkalan data pertama yang mengkhususkan diri pada aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi. Diinisiasi pada tahun 2016, DPD bernaung di Institute of International Studies (IIS), sayap riset dan advokasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

Pangkalan data DPD mencatat aksi-aksi nirkekerasan yang terjadi di Indonesia mulai 1999 hingga saat ini. Secara berkala, DPD meluncurkan siniar yang menampilkan para PNS – Pekerja Nirkekerasan Sehari-hari. DPD juga menerbitkan infografis mingguan, kaleidoskop bulanan, dan refleksi tahunan mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia dan dunia.

Refleksi tahunan yang mulai terbit sejak 2021 ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat demokrasi. DPD percaya bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya diperjuangkan dengan memperkuat struktur demokrasi (pemisahan eksekutif-legislatif-yudikatif, pers yang bebas, pemilu yang *luber* dan *jurdil*, dan lainnya) tetapi juga dengan memperkuat kultur demokrasi – termasuk di dalamnya preferensi dan keterampilan aktor masyarakat sipil dan negara dalam berkontestasi secara nirkekerasan.



## Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>1</b>
Tim Damai Pangkal Damai	
<b>Indonesia 2024: Tidak Baik-Baik Saja .....</b>	<b>5</b>
diah kusumaningrum	
<b>2024 <i>Maximalist Wrapped</i>:</b>	
<b>Cepat atau Lambat, Yang Penting Selamat .....</b>	<b>15</b>
Dhania Salsha Handiani	
<b>Hidup Para Pemimpin!</b>	
<b>Mempertanyakan Aksi Pro-Rezim .....</b>	<b>27</b>
Daniel Petz	
<b>Unarmed Civilian Protection:</b>	
<b>Radikal atau Masuk Akal? .....</b>	<b>39</b>
Huibert Oldenhuis	
<b>Chaiwat Satha-Anand &amp; Misi Mustahilnya .....</b>	<b>45</b>
Chayanit Poonyarat	
<b>198 Metode Aksi Nirkekerasan .....</b>	<b>50</b>
<b>Riwayat Singkat Penulis .....</b>	<b>54</b>
<b>Produk DPD.....</b>	<b>55</b>

Damai Pangkal Damai (DPD) merujuk pada Thomas Weber dan Robert Burrowes yang mendefinisikan “aksi nirkekerasan” sebagai “istilah payung bagi aneka metode berkonflik yang kesemuanya didasarkan pada prinsip tidak menggunakan kekerasan fisik, setidaknya terhadap orang lain.” Padanannya dalam bahasa Inggris antara lain adalah *nonviolence*, *nonviolent action*, *direct action*, *active nonviolence*, *nonviolent resistance*, dan *civil resistance*.

DPD juga merujuk pada Gene Sharp yang mengidentifikasi 198 metode aksi nirkekerasan dan membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu (1) protes dan persuasi, (2) nonkooperasi, serta (3) intervensi.

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).

Thomas Weber and Robert J. Burrowes, “Nonviolence: An Introduction,” *Peace Dossier* 27, no. 2 (February 1991).

## Ringkasan Eksekutif

2024 bisa disebut sebagai tahun pemilihan umum. Betapa tidak, lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di negara yang menggelar pemilihan umum pada tahun itu.

Sayangnya, di banyak tempat, ajang yang seharusnya menjadi “pesta demokrasi” tersebut belum berhasil mengadang, apalagi memukul balik proses otokratisasi yang telah berlangsung secara global hampir dua dekade terakhir. Tidak ada pilihan selain memperkuat dan memperluas perlawanan nirkekerasan yang telah dilalukan selama ini.

Edisi kelima refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) menghadirkan lima segmen. Yang pertama adalah ulasan mengenai perlawanan nirkekerasan di Indonesia yang sempat memuncak pada aksi “Garuda Biru” pada bulan Agustus 2024. Yang kedua adalah pemetaan terhadap gerakan-gerakan maksimalis atau anti-rezim di berbagai belahan dunia, baik yang berhasil, stagnan, maupun meredup. Segmen ketiga membahas gerakan-gerakan pro-rezim, yang umumnya

digawangi kelompok sayap kanan. Adapun segmen keempat mengenalkan *unarmed civilian protection*, sebuah paradigma keamanan dan pengamanan baru, yang berbasis komunitas dan mengandalkan keterampilan warga sipil tak bersenjata. Di segmen kelima, DPD merayakan kehidupan Chaiwat Satha-Anand, pemikir dan praktisi yang menggarisbawahi keselarasan Islam dan nirkekerasan serta tak lelah mengajari negara pentingnya nirkekerasan.



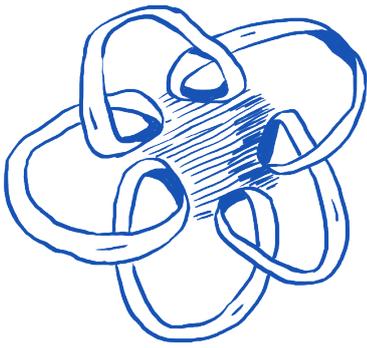
**Garuda Biru.** Dibanding tahun-tahun sebelumnya, perlawanan nirkekerasan di Indonesia tidak banyak meningkat jumlahnya, masih sempit repertoarnya, dan masih rendah intensitasnya. Meski demikian, muncul aksi 22 Agustus, yang cukup efektif menimpakan *dilemma action* kepada lawan. Presiden yang akan selesai menjabat maupun yang baru akan menjabat berhasil dipaksa berhitung ulang ongkos politik, ekonomi, moral, dll, dari mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana memanfaatkan momentum ini untuk memukul balik otokratisasi?



**Rapatkan Barisan.** Riset menunjukkan bahwa salah satu kunci efektivitas perlawanan nirkekerasan adalah dukungan yang luas dari setidaknya 3,5% penduduk. Tidak bisa tidak, masyarakat sipil harus “merapatkan barisan,” tidak bisa mengandalkan aktivis dan mahasiswa saja. Bagaimana meyakinkan buruh, pengemudi ojek *online*, petugas kesehatan, guru, suporter bola, *gamer* daring, para orang tua, dll, untuk turut serta, sekaligus mengupayakan keamanan bagi mereka? Indonesia dapat belajar banyak dari Korea Selatan, Bangladesh, dan Guatemala bagaimana merengkuh kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya tidak melibatkan diri secara langsung dalam perjuangan demokrasi dan keadilan sosial.



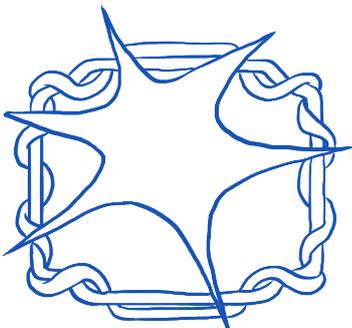
**Bisa Karena Biasa.** Sepanjang 2024, kita menyaksikan gerakan maksimalis meredup di Thailand, Myanmar, dan Peru, meningkat di Iran dan Afghanistan, dan menuai keberhasilan di Korea Selatan, Bangladesh, dan Guatemala. Tidak ada yang tiba-tiba dari keberhasilan Korea Selatan dan beberapa negara lain memakzulkan pemimpin mereka. Meski durasi aksi mereka terlihat sangat singkat, butuh bertahun-tahun membiasakan warga untuk terampil dan aman berdemonstrasi. Lebih jauh, proses ini membangun pemahaman bersama akan apa yang menjadi garis batas (*red line*) masyarakat sipil, yaitu pelanggaran semacam apa oleh rezim yang akan direspons secara cepat dan masif melalui demonstrasi.



**Agak Laen.** Perlawanan nirkekerasan umumnya bersifat anti-rezim dan merupakan alat menjatuhkan diktator. Akan tetapi, belakangan ini muncul aksi-aksi tanpa kekerasan yang bersifat pro-rezim, yang umumnya digawangi kelompok sayap kanan pro-otokrasi. Bagaimana menangkal aksi-aksi semacam itu, yang tidak segan menggunakan juga taktik kekerasan, terutama terhadap kelompok minoritas? Bagaimana memastikan bahwa kita yang mencintai demokrasi lebih unggul menggunakan metode-metode nirkekerasan dibandingkan mereka yang menggunakan metode-metode tanpa kekerasan untuk tujuan-tujuan yang mengkhianati semangat demokrasi?



**Unarmed Civilian Protection (UCP).** Bagaimana mengubah paradigma keamanan, dari bersenjata ke tanpa senjata, dari supremasi militer ke supremasi sipil, dari pengamanan oleh pihak ketiga ke pengamanan oleh komunitas sendiri, dari logika keterputusan (membangun tembok, memenjarakan orang, dll) ke logika keterhubungan (negosiasi, saling jaga, dll)? Sudah ada banyak komunitas dari berbagai belahan dunia yang berhasil mewujudkannya melalui UCP. Siapkah kita berubah?



**Misi Mustahil?** Di tengah pandangan bahwa Islam adalah agama yang sarat kekerasan serta pemahaman bahwa negara adalah lembaga yang memonopoli penggunaan sah terhadap kekerasan, misi Chaiwat Satha-Anand terasa mustahil. Untungnya, ia pergi meninggalkan banyak bukti bahwa Islam dan nirkekerasan tidak bisa dipisahkan, serta negara dapat diajari menggunakan strategi nirkekerasan dalam mengelola kehidupan kewargaan.



RE

## Indonesia 2024: Tidak Baik-Baik Saja

*diah kusumaningrum*

Layaknya Batman merespons Bat-Signal, pada 22 Agustus 2024, ribuan warga Indonesia sontak turun ke jalan menjawab panggilan “Garuda Biru.” Tanpa konsolidasi ber-tele-tele, demonstrasi besar pun terselenggara di berbagai kota, provinsi, dan pulau di seluruh negeri. Meski tagar #DaruratDemokrasi telah sering disuarakan dalam beberapa tahun terakhir, baru pada titik waktu itu ia secara efektif mematahkan wacana bahwa demokrasi Indonesia “baik-baik saja.”

Apakah aksi di atas mengawali gelombang perlawanan baru yang lebih masif dari sebelumnya? Apakah ia hanya *one-hit wonder*, sekali menggelegar lalu tenggelam?<sup>1</sup> Mengapa ia baru muncul pada pertengahan 2024 dan tidak sebelumnya? Bagaimana menilai efektivitasnya? Merujuk pada pangkalan data Damai Pangkal Damai (DPD), tulisan ini mendudukan pertanyaan di atas dalam konteks lebih besar, dengan memperhatikan aneka perjuangan keadilan sosial lain sepanjang 2024 dan setidaknya sepuluh tahun terakhir. Kabar baiknya, berkat kegigihan berbagai perlawanan nirkekerasan oleh masyarakat sipil, penyempitan ruang-waktu sipil (*civic spacetime*) di Indonesia belum berhasil membunuh, meski sudah mencekik, demokrasi Indonesia.

---

<sup>1</sup> Saat menunggu proses penerbitan tulisan ini, muncul aksi digital dengan gambar Garuda berlatar belakang merah serta gambar Garuda berlatar belakang Hitam dengan tagar #IndonesiaGelap yang disambut dengan demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai kota.

## Kotak 1

**Protes dan persuasi** meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku “sekadar” menunjukkan penolakan atau persetujuan. Termasuk di dalamnya adalah demonstrasi, *march*, pawai, petisi, poster, orasi, dan *happening art*.

**Nonkooperasi** meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku bukan sekadar menunjukkan penolakan, tetapi juga menarik partisipasinya dari praktik atau institusi yang dilawan. Termasuk di dalamnya adalah mogok, boikot, dan divestasi.

**Intervensi** meliputi aksi-aksi nirkekerasan di mana pelaku bukan sekadar menunjukkan penolakan dan menarik partisipasinya, melainkan berusaha mendisrupsi praktik atau institusi yang dilawannya itu. Termasuk di dalamnya adalah memblokir, menduduki, mengadakan, dan sebagainya.

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).

## 2024 dalam Angka

Di kali kelima penerbitan refleksi tahunan perlawanan nirkekerasan ini, tidak banyak tren baru yang ditemukan: jumlahnya masih sedikit, repertoarnya masih sempit, dan intensitasnya masih rendah.

Pangkalan data utama DPD, yang didasarkan pada pemberitaan Harian Kompas, mencatat 15.378 aksi nirkekerasan di Indonesia sepanjang Januari 1999 hingga Desember 2024, 335 di antaranya terjadi pada tahun 2024. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun 2023, dan masih jauh dari rata-rata jumlah aksi nirkekerasan sepanjang Reformasi, yang berkisar di angka 600-an (lihat Tabel 1). Mengingat keterbatasan dalam proses pengumpulan data, angka di atas perlu dilihat sebagai didudukan sebagai estimasi bawah. Artinya, secara riil, ada (jauh?) lebih banyak perlawanan nirkekerasan di Indonesia sepanjang 2024 dibandingkan yang terekam dalam pangkalan data utama DPD.

Pangkalan data sekunder DPD, yang menyertakan data dari pemberitaan media nasional lain, pemberitaan media lokal, serta laporan dan media sosial di kalangan organisasi masyarakat sipil, memberi gambaran yang lebih kaya. Di satu sisi, kita jadi semakin tahu bahwa ada cukup banyak perlawanan nirkekerasan yang tidak terekam dalam media arus utama. Di sisi lain, kita jadi lebih sadar bahwa repertoar perlawanan aksi nirkekerasan masih sempit. Sebagian besar di antaranya

masih bergantung pada “paket kombo,” yaitu demonstrasi (metode #47) yang didahului *march* (metode #38), serta diwarnai bentangan spanduk dan poster (metode #8), seruan slogan dan tagar (metode #7), dan ekspresi seni (metode #36). Dalam pangkalan data utama DPD saja, paket kombo mewarnai 61,53% keseluruhan aksi nirkekerasan sepanjang Reformasi dan 61,19% aksi nirkekerasan sepanjang 2024.

Dalam pangkalan data sekunder DPD, jumlah pengadangan dan pendudukan nirkekerasan (metode #171 dan #173) meningkat, terutama dalam melawan perampasan tanah atas nama tambang, ketahanan pangan, maupun proyek strategis nasional (PSN). Mogok makan (metode #159) yang meningkat pada tahun 2023 nyaris tidak muncul di tahun 2024. Adapun mogok kerja (metode #97-117) tetap rendah di Indonesia, di tengah penggunaannya yang meningkat di seluruh dunia. Hanya 37 dari 198 metode aksi nirkekerasan digunakan di Indonesia tahun 2024 (lihat daftar metode aksi nirkekerasan di akhir monograf ini).

Diagram 1

Jumlah aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi

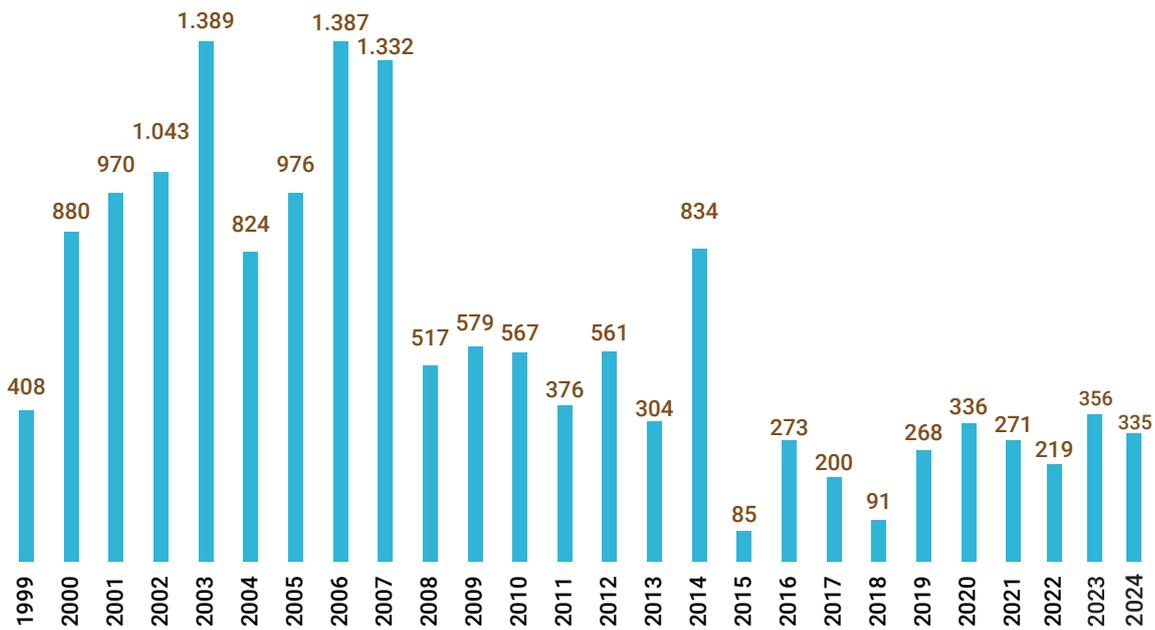
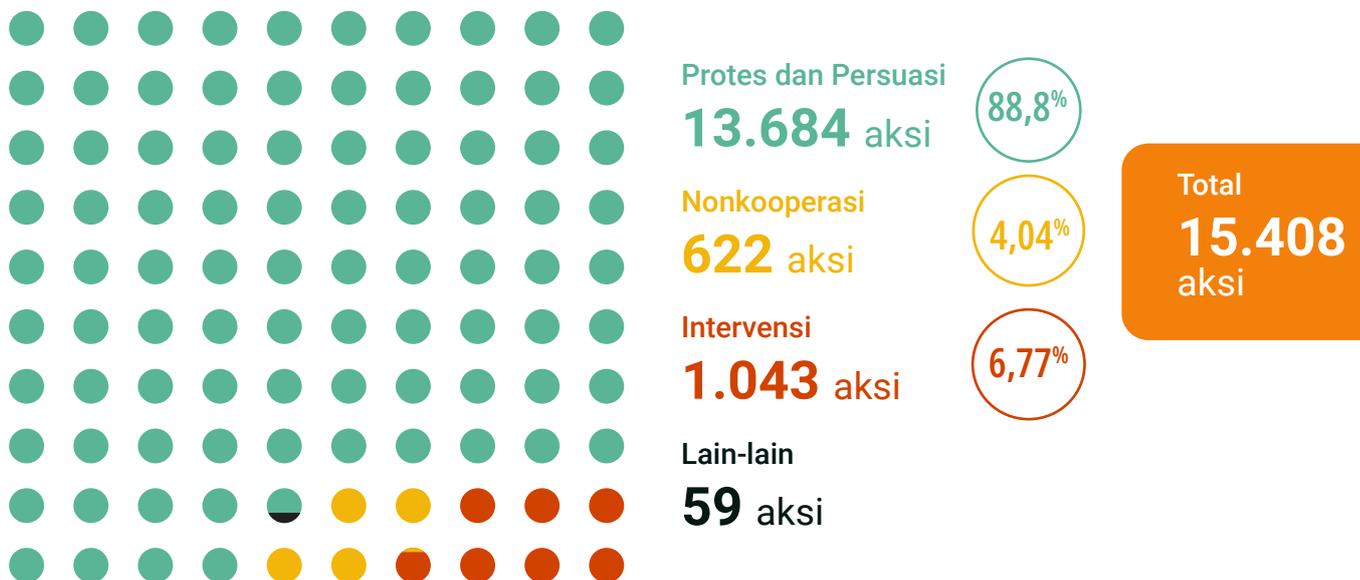


Diagram 2

Kategori aksi nirkekerasan di Indonesia era Reformasi



Pangkalan data utama dan sekunder DPD menunjukkan bahwa sebagian besar aksi nirkekerasan di Indonesia tahun 2024 masih mengandalkan metode-metode protes dan persuasi saja, belum banyak menyertakan metode-metode nonkooperasi dan metode-metode intervensi (lihat Kotak 1). Jika tahun 2023 ditandai meningkatnya penggunaan metode-metode intervensi berupa mogok makan (metode #159) menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), aksi tersebut tidak banyak ditemukan di tahun 2024, di mana tuntutan seputar isu tersebut lebih banyak disampaikan melalui metode-metode protes dan persuasi.

## Corak Perlawanan 2024

Tidak mengherankan bahwa tema tata kelola pemerintahan mendominasi perlawanan nirkekerasan di tahun pemilihan umum 2024. Ini beririsan dengan tema-tema besar lain seputar hak asasi manusia (HAM), perampasan tanah, dan ketenagakerjaan.

Memuncak pada demonstrasi 22 Agustus, perlawanan nirkekerasan di bidang tata kelola pemerintahan dimulai jauh sebelumnya. Januari dan Februari diwarnai deklarasi (metode #3) dan petisi (metode #6) oleh akademisi, terutama para guru besar, di berbagai kampus.<sup>2</sup> Mereka menggarisbawahi betapa rezim Joko Widodo telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang dalam penyelenggaraan negara. Beberapa hari menjelang pemilihan umum di bulan Februari, film *Dirty Vote* diluncurkan,<sup>3</sup> menampilkan tiga akademisi yang membeberkan secara rinci aneka hal yang ditutupi pemerintah (metode #50). Lalu, di bulan Juni, berbagai organisasi masyarakat sipil menggelar Mahkamah Luar biasa (metode #179) di Universitas Indonesia. Proses ini mengungkap struktur operasi pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan rezim Joko Widodo.<sup>4</sup>

Perlawanan nirkekerasan seputar tata kelola negara juga menasar beberapa kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah “paket kombo” (metode #47, #38, #7, #8, dan #36) menentang Rancangan Undang-Undang Penyiaran, mengancam peretasan Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengkritik pemberian izin pertambangan untuk ormas keagamaan, menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, serta mendesak pembatalan Omnibus Law. Yang juga penting dicatat adalah unjuk rasa (metode #47) dan aksi berkemah (*encampment*, metode #173) yang digelar mahasiswa berbagai kampus menuntut pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Tentu, yang paling diingat adalah gelombang protes guna menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), yang memuncak pada 22 Agustus. Besarnya partisipasi publik tidak bisa dilepaskan dari pengurutan dan kombinasi (*sequencing and combining*) aneka metode perlawanan. Dari daring ke luring, gambar Garuda Biru dengan tulisan “Darurat Demokrasi” (metode #8 dan #7) beredar secara luas di media sosial, gedung-gedung, dan panggung konser. Ini diikuti dengan ajakan konsolidasi (metode #8 dan #48) di berbagai kota, yang membuahkan demonstrasi (metode #47) besar-besaran di berbagai penjuru Indonesia, dengan tagar (metode #7) #KawalPutusanMK. Protes ini diwarnai pula oleh peretasan akun surel para anggota DPR dengan pesan agar mereka berpihak pada rakyat (metode #2,

2 Jajaran kampus yang melontarkan kritik tersebut termasuk Universitas Gadjah Mada (31 Januari), Universitas Islam Indonesia dan Universitas Khairun (1 Februari), Universitas Andalas, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Hasanuddin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Atma Jaya, Universitas Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (2 Februari), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Padjadjaran, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, Universitas Islam Malang, dan Institut Pertanian Bogor (3 Februari), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Airlangga, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Janabadra, Universitas Brawijaya, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Malikussaleh, dan Universitas Negeri Malang (5 Februari), Universitas Negeri Jakarta dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD (6 Februari), serta Universitas Trunojoyo Madura (7 Februari). Sangat bisa jadi, terdapat deklarasi dari kampus lain yang luput dari observasi pangkalan data DPD.

3 PSHK Indonesia, “*Dirty Vote (Full Movie)*”, Youtube.

4 Mahkamah Rakyat, “*Mahkamah Rakyat Luar Biasa Ungkap Mekanisme Kejahatan Pelanggaran Konstitusional Rezim Jokowi*”, 28 Juni 2024.

#168, #196), seruan memboikot (metode #55) para *influencer* yang menjadi *buzzer* rezim, serta ajakan memanggil Joko Widodo dengan nama kecilnya, Mulyono (metode #5, #30, #32, dan #35).

Melanjutkan rangkaian di atas, muncul beberapa perlawanan yang ditargetkan kepada individu pejabat dan/atau keluarganya, biasanya diwarnai humor dan bernada satir. Termasuk di dalamnya adalah sindiran (metode #32) penggunaan jet pribadi oleh putra Joko Widodo, serta pemberian karangan bunga (metode #8 dan #21), baik yang bernuansa “duka cita” dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga atas pelantikan presiden dan wakil presiden baru, maupun yang bernuansa “suka cita” atas gelar doktor kepada seorang menteri yang juga merupakan petinggi Partai Golongan Karya.

Di bidang HAM, Aksi Kamisan yang digelar seminggu sekali sejak Januari 2007 (metode #16) konsisten menjadi ruang temu aneka perjuangan keadilan sosial di berbagai kota. Termasuk di dalamnya adalah soal-soal perlindungan terhadap pembela HAM, penegakan hak adat, agama, dan kepercayaan, penghentian perampasan tanah dan pengrusakan lingkungan, pengusutan tuntas brutalitas aparat kepolisian, dan sebagainya. Pada Aksi Kamisan ke-805 di bulan Februari, Ibu Sumarsih memberikan kartu kuning dan kartu merah (metode #18 dan #21) sehubungan dengan luar biasanya pelanggaran HAM dan demokrasi di Indonesia.

Mengingat perjuangan HAM dua tahun terakhir banyak ditekan melalui kriminalisasi dan *judicial harassment*, di mana para pembela “dipaksa” menghabiskan waktu dan energi menjalani aneka proses hukum dan peradilan, aksi pun banyak dilakukan di dalam dan di luar gedung pengadilan, menjelang dan saat sidang berlangsung. Tak lupa, di tengah persoalan-persoalan HAM di negeri sendiri, aktor-aktor masyarakat sipil Indonesia tetap bersolidaritas menyerukan kecaman terhadap pendudukan Israel di Palestina, termasuk genosida yang dilakukan di Gaza. Ini dilakukan melalui seruan (metode #8 dan #7) dan pengungkapan informasi (metode #50) secara daring dan luring, boikot produk Israel dan/atau perusahaan pro-Zionisme (metode #71 dan #77), maupun aksi berkemah (metode #173) para aktivis dan musisi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Di bidang perampasan tanah, yang tentunya sangat beririsan dengan tema HAM, cukup banyak perlawanan yang dilakukan sekaligus di titik destruksi dan titik keputusan (lihat Kotak 2). Perampasan tanah adat Awyu misalnya, ditanggapi sekaligus dengan demonstrasi (metode #47), menggelar ritual adat (metode #40) di Mahkamah Agung, menancapkan salib merah tanda sasi (metode #40, #38, #120), maupun blokade (metode #171 dan #172) dan pendudukan tanah sendiri (metode #173). Sama halnya, perlawanan warga Rempang dilakukan dengan berunjuk rasa (metode #47) di Jakarta serta dengan pasang badan (metode #171-173) di tanah yang dirampas perusahaan atas restu negara. Perlawanan lain yang menarik perhatian publik adalah pelaksanaan People’s Water Forum sebagai forum tandingan (metode #50 dan #179) dari World Water Forum yang digelar di Bali pada bulan Mei, blokade (metode #173) Jalan Labota oleh warga, termasuk para Ibu, menentang pengrusakan lingkungan oleh industri

## Kotak 2

**Titik produksi** adalah tempat suatu produk dibuat, misalnya pabrik dan perkebunan.

**Titik destruksi** adalah tempat sumber daya diekstraksi dan/atau kekerasan fisik dilakukan, termasuk di dalamnya adalah hutan dan situs-situs tambang.

**Titik konsumsi** adalah tempat barang dan jasa diperjualbelikan, misalnya toko, pasar, dan loket pelayanan.

**Titik keputusan** adalah tempat para pemegang kekuasaan mengambil keputusan, termasuk istana kepresidenan, gedung parlemen, ruang pengadilan, dan kantor perusahaan.

**Titik asumsi** adalah tempat di mana narasi dominan dan legitimasi lawan bersemayam, termasuk di dalamnya ideologi, kurikulum, dan artefak budaya populer.

**Titik kesempatan** adalah momen-momen yang dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian massa, misalnya peringatan hari tertentu, kunjungan tokoh penting, atau hari libur nasional.

### Sumber:

Patrick Reinsborough dan Doyle Canning, *Re-Imagining Change: How to Use Story-based Strategy to Win Campaigns, Build Movements, and Change the World* (PM Press, 2017) (diterjemahkan dalam Diah Kusumaningrum, et.al., *Adu Jitu Melawan Otokrat* (Yayasan Humanis, 2024)).

berbasis batubara, ritual (metode #20) lumpur putih oleh warga Malind Makleuw memprotes alih lahan adat menjadi lumbung pangan (*food estate*), unjuk rasa (metode #47) di Desa Rantai Balla menentang pengrusakan lahan warga, unjuk rasa (metode #47) para nelayan menentang ekspor pasir laut, serta aksi buang sampah (metode #21) warga ke kantor Bupati Sintang.

Tentu, masih terdapat banyak perlawanan nirkekerasan lain yang tidak terpantau publik karena tidak terliput dalam media arus utama. Sebagaimana dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA),<sup>5</sup> letusan konflik agraria 2024 meningkat 21% dari tahun sebelumnya, dan meningkat lebih dari 100% di sepuluh tahun rezim Joko Widodo dibandingkan sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selain dalih pembangunan PSN, alasan yang sering dipakai menjustifikasi perampasan tanah warga adalah ketahanan pangan melalui pengadaan lumbung pangan serta keterlanjuran di sektor kehutanan atau *forest amnesty*. Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, sebagian besar perlawanan nirkekerasan di atas ditanggapi secara kekerasan oleh aparat keamanan perusahaan dan/atau negara.

Di bidang ketenagakerjaan, yang terasa paling marak adalah perlawanan di kalangan pengemudi ojek *online* (ojol) dan di kalangan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua gerakan mengandalkan paket kombo (metode #47, #38, #8, #7, dan #36). Yang sedikit membedakan adalah, perlawanan pengemudi ojol diwarnai aksi mogok, sedangkan perlawanan dosen ASN diwarnai lobi kolektif (metode #15)—masing-masing didukung serikat pengemudi ojol dan Serikat Pekerja Kampus. Yang terbilang mengejutkan adalah aksi para hakim memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Pada 7-11 Oktober, mereka cuti bersama (metode #104), berdiam diri di rumah (metode #65), mengosongkan jadwal sidang (metode #114), dan/atau berdemonstrasi (metode #47).

<sup>5</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria, "*Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo?*", 21 Januari 2025.

Perjuangan pengesahan RUU PPRT maupun perjuangan buruh secara garis besar tampak “lebur” ke dalam aksi-aksi lain, termasuk yang diselenggarakan pada Hari Buruh, yang berpusat pada pembatalan Omnibus Law, yang menyuarakan darurat demokrasi, serta yang menentang kenaikan PPN.

## Melawan Sebaik-Baiknya, Sehormat-Hormatnya

Dalam empat edisi sebelumnya, refleksi tahunan DPD menggarisbawahi beberapa hal: *dilemma action*, infrastruktur perlawanan, *authoritarian innovation*, serta disiplin nirkekerasan. Edisi kali ini kembali menekankan hal-hal tersebut dan mendudukkannya dalam konteks kemunculan “Garuda Biru.”

*Pertama*, perlawanan nirkekerasan tidak boleh sekadar dimaknai sebagai aksi “tanpa kekerasan.” Utamanya, ia adalah upaya menimpakan *dilemma action* kepada lawan. Di sini, perlawanan nirkekerasan memaksa lawan berhitung ulang ongkos politik, moral, ekonomi, sosial, dan sebagainya jika meneruskan praktik dan/atau kebijakan mereka.

Berbeda dari aneka demonstrasi sebelumnya, aksi 22 Agustus lebih efektif menimpakan *dilemma action* kepada lawan. Bagi Joko Widodo yang tengah membangun dinasti politik baru, reputasi adalah hal penting, sedangkan bagi presiden dan anggota dewan yang baru akan memulai masa jabatannya, dukungan publik adalah hal penting. Tumpah ruahnya warga di jalanan dan media sosial tampaknya berhasil memaksa mereka berhitung dampak kerusakan reputasi dan turunnya dukungan publik sekiranya mereka mementahkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Pilkada. Ini berbeda dari biasanya, di mana ongkos mengabaikan, atau bahkan merepresi, perlawanan nirkekerasan lebih “murah” daripada menuruti tuntutan warga.

*Kedua*, perlawanan nirkekerasan membutuhkan infrastruktur sedemikian rupa, yang menjadikan “ongkos melawan” di kalangan masyarakat sipil lebih ringan daripada “ongkos tidak melawan.” Aksi 22 Agustus meringankan para pegawai kantor yang ingin terlibat aksi tetapi tidak bisa bolos kerja, yaitu dengan menyediakan kanal-kanal sumbangan finansial. Dana yang terkumpul memungkinkan penyediaan aneka logistik dan layanan, dari minuman, masker anti gas air mata, sampai perawatan medis, yang pada gilirannya meringankan para peserta aksi. Juga, kesiapsediaan tim bantuan hukum meringankan ketakutan aktivis dan pelajar sekiranya mereka ditangkap dan ditahan.

Infrastruktur lain yang tak kalah penting adalah media massa dan media sosial, yang membangkitkan *fear of missing out* (FOMO) di kalangan masyarakat sipil. Melihat teman-temannya, dan bahkan selebriti, menyerukan turun ke jalan pada 22 Agustus, “ongkos tidak melawan” menjadi lebih berat daripada “ongkos melawan.” Termasuk di sini adalah langkah para dosen mengosongkan kelas atau memindahkannya ke jalanan, serta pilihan para orang tua yang ter-

golong Generasi X untuk turun ke jalan. Kalau dosen dan orang tuanya saja ikut demonstrasi, masa *sih* mahasiswa atau anaknya tidak ikut? Aksi para orang tua mencari anaknya ke kantor polisi setelah demonstrasi usai juga menjadi infrastruktur perlawanan yang penting.

Selaras penelitian Erica Chenoweth, membangun aneka infrastruktur yang menjadikan ongkos melawan lebih ringan sangatlah penting. Riset tersebut membuktikan bahwa tidak ada rezim yang dapat bertahan dari protes yang didukung oleh setidaknya 3,5% jumlah penduduk.<sup>6</sup> Artinya, jika kita ingin meningkatkan efektivitas perlawanan aksi nirkekerasan, kita perlu memastikan ada lebih banyak dan lebih beragam yang terlibat dalam aksi, tidak bisa hanya dari kalangan aktivis dan mahasiswa. Kita tidak bisa hanya berseru, "Rapatkan barisan!" tanpa memikirkan bagaimana meringankan ongkos melawan di berbagai kalangan. Bagaimana merengkuh para petugas kesehatan, para guru, para suporter sepak bola, para *gamer* daring, serta kelompok lain yang selama beberapa tahun terakhir semakin tercekik peraturan yang tidak adil? Bagaimana meyakinkan para buruh pabrik dan pengemudi ojol bahwa mahasiswa dan kelas menengah siap menjadi sekutu yang bermakna? Bagaimana pasang badan untuk perempuan, lansia, anak, penyandang disabilitas, pemeluk agama dan kepercayaan minoritas, serta warga dari kelompok ragam SOGIESC sehingga mereka merasa aman bergabung?

*Ketiga*, harus selalu diingat bahwa yang menjadi lawan dari perjuangan keadilan sosial saat ini adalah rezim yang lihai memanfaatkan demokrasi guna mengkonsolidasikan otoritarianisme. Sebagaimana dijabarkan dalam studi *baseline* oleh Yayasan Humanis,<sup>7</sup> para otokrat ini menjalankan serangkaian strategi represi, kooptasi, dan distraksi yang secara efektif mempersempit ruang-waktu sipil. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil disibukkan membuktikan diri "bukan kadrin," mahasiswa disibukkan memperebutkan peluang beasiswa, magang, dan pertukaran dengan universitas luar negeri, dosen disibukkan memenuhi aturan kepangkatan, jurnalis disibukkan mengamankan diri dari serangan digital, dan lain-lain.

Di tengah ini semua, penting bagi masyarakat sipil menentukan garis batas (*red line*) yang tidak bisa ditawar. Bagi warga Korea Selatan misalnya, garis itu adalah monopoli kekuasaan di tangan eksekutif. Ketika ada kenaikan harga, ketika ada aspirasi kenaikan upah, atau persoalan lain, tidak semua warga turun ke jalan. Tetapi, begitu presiden mengumumkan keadaan darurat yang memberinya kekuasaan tak terbatas, warga sontak turun ke jalan. Bukan hanya membatalkan keadaan darurat, mereka bahkan memakzulkan presiden yang diketahui bersangkutan.

Meski tidak pernah disepakati secara eksplisit, bisa jadi masyarakat sipil Indonesia menengarai bahwa rezim Joko Widodo melanggar garis batas tertentu melalui revisi UU Pilkada. Ini yang menyebabkan banyak sekali warga dengan cepat memutuskan ikut turun ke jalan pada 22 Agustus, padahal banyak dari mereka yang tidak ikut dalam demonstrasi pembatalan Omnibus Law, pengesahan UU PPRT, perlindungan hak pengemudi ojol, serta aneka protes

6 Erica Chenoweth, "Questions, Answers, and Some Cautionary Updates Regarding the 3.5% Rule", Harvard University, April 2020.

7 Diah Kusumaningrum, Daniel Petz, Fanya Tarissa Anindita, Dhania Salsha Handiani, dan Ni Kadek Dewi Puspitasari. *Adu Jitu Melawan Otokrat. Laporan Studi Baseline untuk Connect, Defend, Act!* (Yayasan Humanis 2024)

sebelumnya. Ke depannya, perlu dialog yang lebih eksplisit di kalangan masyarakat sipil soal apa yang menjadi garis batas mereka. Garis ini perlu juga disampaikan kepada rezim sehingga mereka tahu bahwa kebijakan yang melanggar garis tersebut akan berhadapan dengan kemarahan masif dari publik.

*Keempat*, perlawanan nirkekerasan yang efektif tidak muncul dalam semalam, tetapi dihasilkan oleh rangkaian pembelajaran dan refleksi yang berulang. Mama Aleta, para Kartini Kendeng, Greta Thunberg, Martin Luther King, Jr., dan bahkan Mahatma Gandhi secara konsisten melatih pikiran, perasaan, dan tubuh mereka akan disiplin nirkekerasan.

Supaya bisa lebih efektif menimpakan *dilemma action* kepada lawan, warga perlu berlatih mengkombinasikan lebih banyak metode aksi nirkekerasan dari kategori nonkooperasi dan kategori intervensi, tidak melulu mengandalkan paket kombo dari kategori protes dan persuasi. Misalnya, di tengah usaha rezim mengkooperasi organisasi keagamaan dan perguruan tinggi dengan izin pertambangan, barangkali *preclusive purchasing* (metode #186) dapat diterapkan. Atau, di tengah *judicial harassment*, aktivis dapat melakukan *reverse trial* (metode #160).

Warga juga perlu berlatih mengombinasikan aksi nirkekerasan konvensional dengan aktivisme digital, terutama dari kategori peralihan dan kategori petarung, tidak melulu mengandalkan kategori penonton<sup>8</sup>. Aneka aksi ini perlu disebar lebih luas ke titik-titik produksi, konsumsi, diskursus, dan peluang, tidak melulu di titik keputusan dan titik destruksi.

“Sporadis, terpencar, tak solid, tak memiliki pemimpin, dan tak punya skenario ajek,” demikian komentar Majalah Tempo terhadap perlawanan nirkekerasan yang memuncak pada 22 Agustus. Bisa jadi, justru pada sifatnya yang (masih) cair itulah terdapat banyak “daya kejut” yang belum bisa diantisipasi dan dilumpuhkan lawan. Dengan memperkuat *dilemma action*, infrastruktur perlawanan, garis batas, serta disiplin nirkekerasan, perjuangan keadilan sosial Indonesia dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sehumat-hormatnya.

---

8 Lihat Diah Kusumaningrum, et.al., *Netizen Juga Manusia Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital* (Yayasan Tifa dan IIS UGM, 2023).



R1E

## 2024 *Maximalist Wrapped*: Cepat atau Lambat, Yang Penting Selamat

Dhania Salsha Handiani

Dari menduduki kantor Perdana Menteri sampai mengubah lagu-lagu K-pop menjadi seruan perlawanan, tahun 2024 dipenuhi gerakan maksimalis yang beragam dan penuh kejutan. Tak hanya melanjutkan yang sudah berjalan dari tahun sebelumnya, tahun 2024 juga menghadirkan gerakan-gerakan maksimalis tipe baru dan tak terduga.

Apa itu gerakan maksimalis? Refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) merujuk pada definisi “gerakan maksimalis” dan “gerakan reformis” yang dikeluarkan Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes (NAVCO) Data Project.<sup>1</sup> Gerakan maksimalis (*maximalist campaign*) merupakan gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang tidak memenuhi aspirasi rakyat. Adapun gerakan reformis (*reformist campaign*) bertujuan mendorong perubahan di isu-isu spesifik saja, tanpa keinginan melengserkan pemerintahan.

Refleksi tahunan DPD juga merujuk pada Manifesto for Nonviolent Revolution karya George Lakey,<sup>2</sup> yang mengatakan bahwa keberhasilan sebuah gerakan dapat dicapai melalui beberapa tahapan revolusi, yaitu tahap penyadaran (*conscientization stage*), tahap pengorganisasian (*organizing stage*), tahap konfrontasi (*confrontation stage*), tahap nonkooperasi massal (*mass non-cooperation stage*), dan tahap pemerintahan paralel (*parallel government stage*). Lebih jauh, refleksi kali ini menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan seringkali tidak tercapai dalam satu siklus saja. Merujuk pada kerangka yang dikembangkan oleh Beautiful Trouble,<sup>3</sup> siklus gerakan (*movement cycle*) tidaklah linear, penuh dengan naik-turun. Siklus tersebut terdiri atas periode krisis (*enduring crisis*, di mana kemarahan warga mulai tumbuh), periode berontak (*uprising*, di mana suatu peristiwa memicu mobilisasi besar-besaran), periode puncak (*peak*, di mana sebuah gerakan mendapatkan perhatian maksimal), periode menyusut (*contraction*, di mana gerakan mulai menerima serangan balasan dan represi, hingga akhirnya *burn out*), periode evolusi (*evolution*, di mana gerakan dituntut berbenah berdasarkan refleksi bersama), dan periode normal baru (*new normal*, di mana gerakan kembali siap menyambut datangnya peristiwa pemicu dengan langkah-langkah ofensif).

Apa yang berbeda dari gerakan-gerakan maksimalis tahun 2023 dan tahun 2024? Refleksi DPD 2023 mencatat beberapa hal: melemahnya perlawanan sipil di Sudan dan Iran, keberlangsungan gerakan di Afghanistan, Rusia, Panama, Guatemala, dan Tunisia (beberapa di antaranya secara strategis berubah haluan menjadi gerakan reformis), bangkitnya kembali gerakan di Myanmar dan Thailand, serta munculnya gerakan-gerakan baru di Peru, Suriah, Polandia, Bangladesh, Ghana, Afrika Selatan, dan Madagaskar.

1 Weatherhead Center for International Affairs, “What is a maximalist campaign?,” 2023.

2 George Lakey, *A Manifesto for Nonviolent Revolution* (Philadelphia: Movement for a New Society, 1976).

3 Beautiful Trouble, “The Movement Cycle,” 2024.

Di tahun 2024 ini, DPD menggarisbawahi dinamika yang baru dan lebih luas. Terlepas dari stagnannya gerakan-gerakan di Rusia, Panama, dan Sudan, tulisan ini menelaah penyusutan yang dialami gerakan di Thailand, Myanmar, dan Peru, ragam daya tahan yang ditunjukkan gerakan di Iran, Afghanistan, dan Tunisia, serta keberhasilan yang dicapai gerakan di Bangladesh dan Guatemala. Tulisan ini juga membahas munculnya gerakan baru nan signifikan di Kenya, Korea Selatan, dan Georgia, kondisi pasca-gerakan maksimalis di Sri Lanka dan Suriah, serta munculnya gerakan maksimalis “tipe baru” di Kolombia, Spanyol, dan Polandia yang memuat unsur-unsur sayap kanan.

## Yang Berhenti, Berlanjut, dan Berhasil dari Tahun 2023

Memasuki tahun 2024, gerakan-gerakan yang ada sedari tahun 2023 menunjukkan laju perkembangan yang berbeda. Meski gerakan di **Thailand**, **Myanmar**, dan **Peru** mengalami kemunduran, gerakan-gerakan lain di **Iran**, **Afghanistan**, dan **Tunisia** berhasil bertahan. Adapun bagi gerakan di **Bangladesh** dan **Guatemala**, tahun 2024 merupakan tahun kemenangan.

Di tahun 2023, dunia sempat digemparkan oleh kebangkitan gerakan di **Thailand** dan **Myanmar** yang sudah sekian lama tiarap menghadapi represi negara. Sayangnya, kedua gerakan tersebut kembali melemah pada tahun 2024. Setelah periode refleksi dan reorganisasi, pelemahan gerakan kembali terjadi seiring hilangnya beberapa momentum yang memicu kebangkitan mereka. Di Thailand, protes di jalanan menurun setelah pembubaran Move Forward Party (MFP) pada tanggal 7 Agustus 2024.<sup>4</sup> Berkaca pada pembubaran Future Forward Party (FF) tahun 2020 silam, seorang pengamat menjelaskan bahwa meredupnya protes tidak dapat dilepaskan dari keputusan yang dirasakan warga.<sup>5</sup> Sementara itu, melemahnya perlawanan nirkekerasan di Myanmar terjadi seiring jatuhnya beberapa kota ke tangan kelompok bersenjata setempat, membalikkan momentum yang tadinya menguntungkan gerakan nirkekerasan.

Sedikit berbeda dengan gerakan di Thailand dan Myanmar, gerakan maksimalis di **Peru** sempat mengalami mobilisasi besar-besaran di tahun 2023. Sayangnya, gerakan ini akhirnya melemah di tahun 2024, saat mereka dihadapkan dengan represi luar biasa dari negara. Atas perintah Presiden Dina Boluarte, para pengunjuk rasa menjadi target kekerasan polisi dan militer. Dalam kapasitas terbatas, sekelompok warga masih meneruskan perlawanan. Akan tetapi, secara umum, gerakan di Peru terpaksa tiarap dan memasuki periode penyusutan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, ada juga yang di tahun 2023 mengalami periode penyusutan tetapi di tahun 2024 dapat mempertahankan keberadaan mereka. Di **Iran**, perlawanan yang berawal dari mobilisasi puluhan ribu orang memprotes pembunuhan Mahsa Amini oleh para “polisi moral” sempat tiarap diterpa represi, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Meski demikian,

4 Michael Montesano, “*The dissolution of Thailand’s Move Forward Party is a dead end but it is not clear for whom*”, East Asia Forum, 13 Agustus 2024.

5 Panarat Anamwathana, “*Will dissolution of Thailand’s Move Forward Party reignite wave of youth-led protests?*”, SCMP, 17 Agustus 2024.

6 Brian Osgood, “*Peruvian democracy weakened as government consolidates control: Report*”, Al Jazeera, 22 Maret 2024.

gerakan ini berhasil bertahan dengan melancarkan “revolusi terselubung.” Hal yang sama terjadi di **Afghanistan**. Di kedua negara, warga memilih metode-metode perlawanan nirkekerasan yang cenderung terselubung dan kultural guna mencegah lebih banyak korban jiwa, dengan tetap memastikan adanya tempat mengkonsolidasikan dukungan dan solidaritas.

Perlawanan terselubung yang dilakukan warga Iran termasuk aksi tidak mengenakan hi-  
jab saat berkegiatan di luar rumah (metode #141), menutup toko secara sementara (metode #136), serta memunculkan grafiti dan konten media sosial yang mengandung pesan-pe-  
san perlawanan (metode #7 dan #8).<sup>7</sup> Di Afghanistan, 10 perempuan dengan penutup wa-  
jah melakukan *march* (metode #38) di jalanan Kabul, sembari memegang poster-poster kecil  
(metode #8) dan meneriakkan slogan “Perempuan setara haknya dengan hak laki-laki” dan  
“Taliban harus dikutuk” (metode #7). March ini merupakan buah kampanye daring beberapa ta-  
hun kebelakang, yang awalnya dilakukan guna menentang pembungkaman suara perempuan  
oleh Taliban, di mana ratusan warga menggugah video mereka bernyanyi dan membaca puisi  
di internet (metode #141). Puncak march tersebut digelar pada 11 September 2024, meng-  
akhiri satu tahun tiarapnya gerakan di Afghanistan.<sup>8</sup>

Sementara itu, perlawanan terhadap pemerintahan otoriter Presiden Kais Saied di Tunisia,  
yang sudah muncul sejak tahun 2023, terus berlanjut. Menjelang pemilihan presiden baru di  
bulan Oktober 2024, ribuan warga **Tunisia** menggelar *march* (metode #38) dan demonstrasi  
(metode #47) berminggu-minggu, dengan slogan (metode #8) “Lengserkan Diktator Saied!”  
dan “Rakyat menginginkan jatuhnya rezim!”<sup>9</sup> Mereka juga mengecam intimidasi oleh rezim ter-  
hadap calon presiden lain, sembari menuntut pembebasan warga yang ditahan atas perintah  
sang presiden.<sup>10</sup>

Sedikit berbeda, gerakan maksimalis di **Guatemala** dan **Bangladesh** yang telah “lolos” peri-  
ode penyusutan dan evolusi meraup keberhasilan luar biasa di tahun 2024. Dengan meng-  
amankan dukungan dari berbagai segmen masyarakat—termasuk pelajar, pegawai swasta,  
pegawai sektor publik, pekerja informal, petani, dan tokoh adat—gerakan di Guatemala dapat  
dengan gesit menangkal kekerasan yang dilancarkan lawan. Contohnya, ketika membuat seki-  
tar 120 blokade jalan (metode #171), para demonstran sempat berhadapan dengan aparat  
kepolisian yang berusaha memprovokasi kerusuhan.<sup>11</sup> Namun, upaya ini dapat segera di-  
gagalkan dengan datangnya warga sipil hingga melebihi jumlah aparat. *Safety net* serupa  
memungkinkan warga meningkatkan strategi aksi nirkekerasan mereka—antara lain dengan  
menggelar mogok massal (metode #117)—yang berhasil mendesakkan pelantikan Bernardo  
Arévalo sebagai presiden baru Guatemala pada tanggal 14 Januari 2024.

7 Bahar Makooi, “*Two years after the death of Mahsa Amini, a ‘quiet revolution’ is still under way in Iran*”, France 24, 16 September 2024.

8 Ruchi Kumar, “*If We Don’t, Who Will?—How Women in Afghanistan Are Speaking Out*”, The Persistent, 22 Oktober 2024.

9 RFI, “*Tunisians resume protests against president ahead of October election*”, 23 September 2024.

10 Tarek Amara, “*Tunisians protest against president ahead of election*”, Reuters, 14 September 2024.

11 Sonia Pérez D., “*Guatemalan police begin clearing protesters’ roadblocks after president threatens a crackdown*”, AP News, 11 Oktober 2023.

Gerakan maksimalis di Bangladesh juga berujung manis, di mana para demonstran sukses memakzulkan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada tanggal 5 Agustus 2024. Awalnya, ini adalah gerakan reformis, di mana puluhan ribu mahasiswa turun ke jalan guna mengancam sistem kuota rekrutmen pegawai negeri sipil yang dinilai diskriminatif. Mobilisasi massal ini dimungkinkan oleh memori kolektif protes serupa pada tahun 2018 serta protes anti-rezim di tahun-tahun sebelumnya.

Memori kolektif ini juga memungkinkan warga Bangladesh melakukan reorganisasi cepat saat negara melancarkan represi besar-besaran yang kemudian dikenal sebagai *July massacre*. Ketika akses internet diputus, ribuan orang terluka, dan ratusan orang terbunuh,<sup>12</sup> siklus gerakan bergerak cepat dari periode berontak ke periode puncak. Protes mahasiswa pun dengan cepat meluas menjadi gerakan bersama antara mahasiswa dan rakyat (*Student-People's Uprising*).<sup>13</sup> Dengan merangkai aneka isu—dari buruknya perekonomian negara, maraknya korupsi, tingginya pelanggaran hak asasi manusia, dan kemunduran demokrasi—mahasiswa berhasil menggandeng dosen, artis, influencer, pengacara, dan anggota partai politik. Perlawanan pun dapat ditingkatkan intensitasnya—yang tadinya hanya mencakup pawai dan demonstrasi (metode #38 dan #47), menjadi aksi duduk (metode #171),<sup>14</sup> pemogokan pegawai pemerintah (metode #145), penolakan membayar pajak dan tagihan listrik (metode #196),<sup>15</sup> serta pendudukan istana (metode #173),<sup>16</sup> yang akhirnya mendorong pemunduran diri sang perdana menteri, pembentukan pemerintahan sementara, dan pembebasan para tahanan politik.

Tahun 2024 menjadi saksi bagaimana aneka perlawanan di tahun 2023 menjalani siklus gerakan dengan dinamikanya masing-masing. Kesuksesan Guatemala dan Bangladesh mencapai periode terakhir tidak dapat dilepaskan dari luasnya dukungan warga dari berbagai sektor dan lapisan. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya memungkinkan mereka “saling belajar” dan “saling tahu” apa peran masing-masing di periode krisis. Tentu saja, pemahaman bersama tersebut hanya bisa muncul dari refleksi dan reorganisasi rutin di kalangan warga mengenai apa yang efektif dan tidak efektif dalam gerakan mereka. Di Iran dan Afghanistan, periode evolusi ini ditandai tindakan perlawanan terselubung yang memungkinkan gerakan untuk tiarap tanpa sepenuhnya berhenti. Lebih jauh, para perempuan di Iran dan Afghanistan juga melancarkan perlawanan di lingkup keluarga masing-masing. Di sini, para perempuan mencoba mengajak para anggota keluarga laki-laki supaya menggunakan privilese mereka dengan menjadi sekutu perjuangan, terutama ketika para perempuan berhadapan langsung dengan ancaman keamanan.

---

12 Umar A Farooq dan Azad Essa, “*Why did Bangladesh student protests spark a crisis for the Hasina government?*”, Middle East Eye, 23 Juli 2024.

13 Charlie Campbell, “*Bangladesh on Brink as Anti-Government Protests Become ‘People’s Uprising’*”, Time, 5 Agustus 2024.

14 Mahathir Mohammed, “*Protesters demand govt’s resignation, reject PM’s calls for dialogue*”, Dhaka Tribune, 2 Agustus 2024.

15 Agence France-Presse, “*Bangladeshi students call for nationwide civil disobedience*”, VOA, 3 Agustus 2024.

16 Nadine Shaanta Murshid, “*Bangladeshi students and activists have legitimised their commitment to democracy*”, Hyphen, 29 Agustus 2024.

Di beberapa negara lain, siklus gerakannya cenderung tidak linier. Dalam kasus Thailand dan Myanmar, hilangnya momentum dan pendeknya kesempatan berefleksi memaksa gerakan untuk kembali pada periode penyusutan. Sementara itu, stabilnya gerakan di Tunisia dan menyusutnya gerakan di Peru bisa jadi merupakan strategi mengulur waktu guna memperpanjang usia gerakan di kemudian hari.

## Gerakan Maksimalis Baru Nan Kukuh

2024 juga menjadi saksi munculnya beberapa gerakan maksimalis baru, yaitu di **Kenya**, **Korea Selatan**, dan **Georgia**. Sebagian besar gerakan ini muncul dengan orientasi reformis, sebelum akhirnya berubah menjadi perlawanan masif dengan agenda menurunkan pemimpin yang berkuasa.

Perlawanan di **Kenya** dan **Korea Selatan** awalnya muncul sebagai bentuk protes warga terhadap rancangan undang-undang maupun undang-undang yang dinilai kontroversial. Di bulan Juni 2024, ribuan warga Kenya mulai berdemonstrasi menentang rencana pemberlakuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan oleh Presiden William Ruto yang ditakutkan meningkatkan harga komoditas di tengah terpuruknya perekonomian negara mereka.<sup>17</sup> Sementara itu, kemarahan publik Korea Selatan muncul pada dini hari tanggal 3 Desember 2024, ketika Presiden Yoon Suk Yeol secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer dengan dalih melindungi negara dari "kekuatan komunis Korea Utara."<sup>18</sup>

Di Kenya, kecakapan Gen Z memanfaatkan berbagai platform digital untuk melakukan aktivisme tidak hanya memudahkan mobilisasi dan koordinasi massa, tetapi juga mengamplifikasi tekanan terhadap pemerintah. Selain memviralkan tagar #OccupyParliament dan #RejectFinanceBill2024 (metode #7), warga Kenya juga meretas dan mengganggu situs pemerintah (metode #193), membocorkan informasi pribadi beberapa pimpinan politik sembari mengirimkan pesan pendek maupun WhatsApp bertubi-tubi ke nomor mereka (metode #31 dan #32), serta membuat "wall of shame" digital yang mencatat nama-nama politisi yang mendukung RUU Keuangan (metode #30).<sup>19</sup>

Orang muda juga memiliki sumbangsih sangat besar dalam gerakan di Korea Selatan. Mereka memastikan demonstrasi memprotes darurat militer berlangsung secara masif dan meriah. Dipenuhi lautan *lightstick* (metode #24) dan lagu-lagu K-pop yang disulap menjadi pesan-pesan perlawanan (metode #37), ribuan warga dari berbagai lapisan lebur dalam barisan tanpa rasa takut.<sup>20</sup> Perlawanan mereka tidak berdiri sendiri. Pada malam ketika darurat militer diumumkan, beberapa anggota parlemen menerobos barikade militer guna memasuki gedung Majelis Nasional dan melakukan sidang luar biasa guna membatalkan darurat militer tersebut.

17 Nimo Omer, "Thursday briefing: How one controversial bill has Kenya on the brink of disorder", The Guardian, 18 Juli 2024.

18 Sarah A. Son, "South Korea: defeat of president's attempt to impose martial law shows a robust democracy at work", The Conversation, 4 Desember 2024.

19 Job Mwaura, "Kenya protests: Gen Z shows the power of digital activism - driving change from screens to the streets", The Conversation, 23 Juni 2024.

20 Tempo.co, "Light Stick, K-Pop dan Perjuangan Anak Muda Korsel Menuntut Mundurnya Yoon Suk Yeol", 14 Desember 2024.

Mereka juga memutuskan untuk menginap di dalam gedung Majelis Nasional guna mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran lain oleh Presiden Yoon dan partainya (metode #173).<sup>21</sup>

Dalam waktu singkat, kedua gerakan berhasil mendesak pemerintah menyetujui tuntutan reformis awal mereka. Ini menjadi landasan bagi gerakan untuk mengajukan tuntutan maksimalis. Setelah berhasil menggagalkan RUU Keuangan, kelompok muda di Kenya tetap melanjutkan demonstrasi (metode #47), sembari melakukan mogok massal (metode #117) dan blokade jalanan (metode #171), kali ini guna menuntut pengunduran diri Presiden Ruto dan menyoroti berbagai macam persoalan yang masih melanda Kenya.<sup>22</sup> Karena tidak mampu menenangkan massa, presiden pun membubarkan hampir seluruh kabinetnya.<sup>23</sup> Protes terus berlanjut, dan bahkan memicu demonstrasi lain di negara tetangga—di antaranya di Nigeria, Uganda, Zimbabwe, Angola, Eswatini, Namibia, Mozambik, dan Afrika Selatan—guna memprotes korupsi, kesenjangan sosial, dan pemerintahan yang buruk di negara masing-masing.<sup>24</sup>

Selain dari bertambahnya jumlah demonstran, intensifikasi gerakan di Korea Selatan juga dapat dilihat dari berbagai *dilemma action* yang ditimpakan warga kepada Presiden Yoon. Selama demonstrasi berlangsung, 2.500 aktor dan sutradara ternama menunjukkan solidaritas dengan mengajukan dokumen resmi yang mendukung pemakzulan sang presiden (metode #2), yang pada akhirnya mengangkat liputan perlawanan ke kancah internasional.<sup>25</sup> Beberapa artis K-pop juga membatalkan konser mereka guna memberikan pertunjukan gratis (metode #36) di tengah protes yang berlangsung. Yang tidak dapat hadir di lapangan menunjukkan solidaritas dengan menyediakan makanan dan minuman untuk para demonstran.<sup>26</sup> Beberapa warga secara konsisten mengirimkan karangan bunga dukacita (metode #21 dan #43) ke kantor-kantor partai yang tidak menyetujui tuntutan rakyat, serta merobek bendera yang memuat wajah-wajah anggota parlemen yang mendukung Presiden Yoon (metode #30). Rentetan aksi ini mencapai puncaknya pada deklarasi pemakzulan Presiden Yoon oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 Desember 2024.<sup>27</sup>

Sementara itu, di **Georgia**, gelombang pertama protes muncul sebagai kritik terhadap dugaan kecurangan dalam proses pemilihan anggota parlemen pada tanggal 26 Oktober 2024. Di sini, puluhan ribu warga—termasuk tokoh-tokoh oposisi utama—menggelar demonstrasi (metode #47) di depan gedung parlemen guna mengecam partai pemenang Georgian Dream (GD) yang telah lama menunjukkan kecenderungan otoriter.<sup>28</sup> Selain berdemonstrasi,

---

21 Koh Ewe, Tessa Wong, Nick Marsh, Jake Kwon, dan Yuna Ku, "*Fear, fury and triumph: Six hours that shook South Korea*", BBC, 4 Desember 2024.

22 Reuters, "*Kenyan protesters demand Ruto's resignation*", 2 Juli 2024.

23 Tafi Mhaka, "*Is a sub-Saharan 'African Spring' in the offing?*", Al Jazeera, 6 Agustus 2024.

24 Tafi Mhaka, "*Is a sub-Saharan 'African Spring' in the offing?*", Al Jazeera, 6 Agustus 2024.

25 Kpop Charts, *Twitter*, 7 Desember 2024.

26 Yim Seung-hye, "*Korean celebrities show support to protesters*", Korea JoongAng Daily, 15 Desember 2024.

27 Reuters, "*How events in South Korea played out after President Yoon's martial law declaration*", 25 Januari 2025.

28 Emma Burrows, "*Tens of thousands rally in Georgia to denounce the parliamentary election they say was rigged*", AP News, 29 Oktober 2024.

mahasiswa di seluruh Georgia juga mogok (metode #62) dan menduduki kampus mereka (metode #173).<sup>29</sup> Gelombang kedua protes muncul pada tanggal 28 November 2024, saat Perdana Menteri Irakli Kobakhidze mengumumkan penolakan GD atas bantuan Uni Eropa dan penangguhan pembicaraan terkait keanggotaan Georgia di Uni Eropa. Sekali lagi, ribuan orang memenuhi jalanan dalam ratusan aksi demonstrasi, di mana mereka juga membentuk rantai manusia (metode #171) sepanjang beberapa kilometer. Protes ini pun dicatat sebagai “yang paling signifikan sejak Revolusi Mawar di tahun 2003.”<sup>30</sup>

Sekilas, ketiga gerakan di atas tampak bereskalasi sangat cepat dari periode berontak ke periode puncak. Perlu dicermati bahwa eskalasi tersebut tidak dapat terjadi tanpa pengalaman kolektif yang berulang di tahun-tahun sebelumnya, yang menjadikan warga terbiasa dengan metode-metode aksi nirkekerasan tertentu. Dengan berkali-kali turun ke jalan, mogok, memasang blokade, dan sebagainya, warga membangun periode normal baru. Ini menjadi modal penting mengeskalasi gerakan ke periode puncak dan mengunci kemenangan.

Mobilisasi spontan puluhan ribu warga tentunya tidak mudah. Di Georgia, faktor penentuannya adalah ingatan kolektif warga akan Revolusi Mawar 2003, di mana kegigihan dan komitmen nirkekerasan saat itu berhasil menggulingkan diktator Eduard Shevardnadze. Di Korea Selatan, pembelajaran dari gerakan maksimalis tahun 1980an, 2016, dan 2017, serta gerakan reformis tahun-tahun setelahnya menjadi modal penting. Salah satu taktik yang digunakan adalah menempatkan warga dengan pengalaman protes lebih dari 30 tahun di garis terdepan,<sup>31</sup> guna memberi rasa aman bagi warga yang baru pertama kali ikut turun ke jalan. Sepanjang berdemonstrasi, warga juga mengibarkan bendera-bendera konyol – misalnya, yang bertuliskan “Persatuan Kaum Rebahan di Rumah” atau “Asosiasi Pangsit” mengantisipasi tuduhan ditunggangi partai politik tertentu seperti saat mereka menurunkan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016-2017.<sup>32</sup> Ketika memprotes kesewenangan kepala negara sudah menjadi normal baru, operator telekomunikasi ternama seperti SK Telecom, KT, dan LG Uplus pun tahu bagaimana berkontribusi dan bersolidaritas. Mereka dengan sengaja meningkatkan kapasitas jaringan guna mengantisipasi gangguan dan serangan terhadap jaringan seluler para demonstran.<sup>33</sup> Adapun di Kenya, transfer pengetahuan terkait pengorganisasian gerakan lebih mengandalkan pembelajaran horisontal dari negara lain, dan bukan pembelajaran vertikal antargenerasi.

---

29 JAMnews, “[Student protests in Batumi spark solidarity across Georgian universities](#)”, 15 November 2024.

30 John Chin dan Anastasia Kim, “[Georgia's Second Rose Revolution](#)”, The Loop, 2024.

31 Jenny, [Twitter](#), 7 Desember 2024.

32 Joseph Kim, [Twitter](#), 6 Desember 2024.

33 Lee Min-hyung, “[Telecoms in emergency mode as massive rallies continue](#)”, The Korea Times, 2024.

## Habis Sukses, Terbitlah ...

Kesuksesan gerakan maksimalis tidak bisa semata-mata diukur dari besarnya jumlah massa yang berpartisipasi dan tercapainya tujuan gerakan. Seperti halnya di **Sri Lanka** dan **Suriyah** pada tahun 2024 ini, perjuangan tidak otomatis berhenti saat rezim berhasil dilengserkan.

Meski gelombang demonstrasi di **Sri Lanka** tahun 2022 telah berhasil memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa turun, perjuangan warga terus berlanjut. Pemilihan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe oleh parlemen sebagai presiden baru Sri Lanka tidak membuahkan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, di mana represi terhadap warga sipil tetap dilanggengkan.<sup>34</sup> Pengacara dan aktivis hak asasi manusia Swasthika Arulingan pun mengakui bahwa warga “belum berhasil mencapai tujuan jangka panjang gerakan... belum ada perubahan dalam sistem politik, belum ada akuntabilitas terhadap korupsi, dan tokoh-tokoh yang mencuri uang rakyat masih saja berkuasa.”<sup>35</sup>

Titik terang muncul dengan bangkitnya National People’s Power (NPP), partai berhaluan kiri yang bertujuan menghapus patronase politik. Kepercayaan rakyat kepada NPP tercermin dalam kemenangan kandidat partai tersebut, Anura Kumara Dissanayake, dalam pemilihan presiden 2024. Transformasi penting ini tidak mungkin tercapai jika keberhasilan menurunkan presiden secara nirkekerasan pada tahun 2022 tidak dikawal dengan perjuangan nirkekerasan lebih lanjut.

Tapi, apa jadinya jika yang menjatuhkan rezim adalah kelompok bersenjata, bukan gerakan nirkekerasan? Di **Suriyah** misalnya, meski ada serangkaian gerakan maksimalis nirkekerasan di tahun 2023, Presiden Bashar al-Assad baru bisa dilengserkan setelah kelompok paramiliter Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) menduduki Damaskus di tahun 2024.<sup>36</sup>

Sejumlah penelitian—termasuk oleh Karatnycky & Ackerman (2005) dan Celestino & Gleditsch (2013)—menunjukkan bahwa transisi rezim oleh kelompok bersenjata cenderung melahirkan otokrasi baru. Meski lengsernya al-Assad sempat disambut dengan sukacita, ketegangan dan ketakutan terhadap rezim baru di Suriyah muncul dengan cepat. Contohnya, puluhan ribu minoritas agama dan etnis—termasuk kelompok Kristen, Druze, dan Alawi—memilih mengungsi ke negara-negara tetangga karena takut dipersekusi oleh rezim baru.<sup>37</sup> Setelah pengunduran diri al-Assad pun, gereja masih dijarah dan desa-desa kelompok minoritas masih dibakar oleh para anggota paramiliter.<sup>38</sup> Di sini, penting bagi sisa-sisa gerakan di tahun 2023 untuk dapat mewujudkan periode normal baru, yang menempatkan keselamatan kelompok rentan sebagai agenda pokok. Bisa jadi, *unarmed civilian protection* (UCP, lihat bab yang ditulis Huibert Oldenhuis di edisi ini) menjadi elemen penting normal baru ini.

34 Roshni Kapur, “*Sri Lanka’s political elite fails to gatekeep change*”, East Asia Forum, 13 November 2024.

35 Anbarasan Ethirajan, “*Sri Lanka: The fate of a protest that toppled a president*”, BBC, 9 Juli 2023.

36 Antoinette Radford, “*The Assad regime ruled Syria for 50 years. Here’s how it fell in less than two weeks*”, BBC, 9 Desember 2024.

37 Ramazan Kilinc, “*Why Syria’s reconstruction may depend on the fate of its minorities*”, The Conversation, 18 Desember 2024.

38 Ammar Abdulhamid, “*Syria’s Communal Diversity and the Challenges of Transition*”, Lawfare, 8 Januari 2025.

## Gerakan Maksimalis yang Agak Laen?

Tahun 2024 juga menyaksikan munculnya protes-protes anti-pemerintah yang berbeda dari gerakan maksimalis pada umumnya. Alih-alih bertujuan menggulingkan pemerintahan otoriter, protes di **Kolombia**, **Spanyol**, dan **Polandia** justru digerakkan oleh kelompok-kelompok sayap kanan yang mengancam reformasi sosial oleh pemerintah berhaluan kiri.

Pada bulan April 2024, puluhan ribu warga memenuhi jalanan di beberapa kota di **Kolombia** guna memprotes agenda progresif presiden sayap kiri Gustavo Petro. Sembari berteriak "Petro keluar!" massa yang didukung kelompok bisnis dan politisi konservatif ber-demonstrasi menolak usulan reformasi ekonomi dan sosial yang diajukan Petro.<sup>39</sup> Padahal rancangan kebijakan Petro memperkuat perlindungan terhadap pekerja dan serikat pekerja serta memperluas akses warga terhadap layanan kesehatan.

Di **Spanyol**, ratusan ribu orang memprotes pemerintahan sosialis Perdana Menteri Pedro Sanchez dengan menduduki Plaza de Castilla di Madrid, sambil meneriakkan "Demi persatuan, martabat, penegakkan hukum, dan kebebasan. Adakan pemilihan umum sekarang!"<sup>40</sup> Didukung oleh partai-partai sayap kanan di Spanyol, massa menuntut pengunduran diri Sanchez dan menyatakan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan, termasuk amnesti untuk aktivis kemerdekaan Catalan serta pendekatan ramah imigran.<sup>41</sup>

Sementara itu, di Warsawa, **Polandia**, ribuan warga dan anggota partai oposisi konservatif menggelar unjuk rasa anti-pemerintah. Sembari membentangkan bendera nasional dan mengutarakan slogan-slogan rasis "*White Europe of brotherly nations!*" para pengunjuk rasa mengutuk kedekatan pemerintah dengan Uni Eropa dan kebijakan-kebijakan pro-pengungsi.<sup>42</sup>

Dalam refleksi tahunan DPD 2021, Daniel Petz menulis bab berjudul "Sisi Gelap Nirkekerasan." Tulisan tersebut mengingatkan bahwa kelompok-kelompok konservatif dan sayap kanan di berbagai belahan dunia semakin terang-terangan dan terampil memanfaatkan metode-metode tanpa kekerasan. Karenanya, selain mengasah keterampilan melancarkan perlawanan nirkekerasan terhadap pemerintahan otoriter, normal baru perlu juga diwarnai kesiapan warga untuk adu jitu dengan warga sipil lain yang menggunakan metode tanpa kekerasan bukan untuk tujuan yang berkeadilan.

39 AP News, "[Tens of thousands of Colombians protest against the leftist president's reform agenda](#)", 22 April 2024.

40 Agence France-Presse, "[Thousands join right-wing rally against Spanish government](#)", VOA, 20 Oktober 2024.

41 Agence France-Presse, "[Thousands join right-wing rally against Spanish government](#)", VOA, 20 Oktober 2024.

42 Marek Strzelecki dan Aleksandra Michalska, "[Far-right Independence Day march in Warsaw draws thousands](#)", Reuters, 12 November 2024.

## Calon Gerakan Maksimalis?

Secara umum, 2024 menjadi tahun yang dipenuhi peristiwa pemicu amarah massa di berbagai belahan dunia. Walaupun tidak (atau belum) berorientasi maksimalis, ada beberapa gerakan reformis yang berpotensi menjadi gerakan maksimalis.

	2020	2021	2022	2023	2024
Afghanistan		→	●←	●←	↑←
Afrika Selatan				→	●→
Albania			→	✓	
Aljazair	→	↑→	↓→		
Bangladesh				→	✓
Belarusia	→	↓→	↓→		
Bulgaria	→	✓			
Chili	→	✓			
China			→	✓	
Ekuador			→	✓	
El Salvador		→			
Georgia					→
Ghana					●→
Guatemala		→	↑→	✓+←	✓+→
Hong Kong	→	↓→	↓→		
Iran			→	↓→	↑→
Kenya					→
Kolombia	→	↑→			
Korea Selatan					✓+→
Kyrgyzstan	→				
Lebanon	→	↑→			
Madagaskar				→	●→
Malawi	→				
Myanmar		→	↓→	↑→	↓→
Panama			→	●←	
Peru	→			→	↓→
Polandia				→	
Rusia		→	●←	●←	
Sri Lanka			→	✓	
Sudan	→	↑→	↑→	↓→	
Suriah				→	
Thailand	→	↓→	↓→	↑→	↓→
Tunisia			→	●→	●→

Diagram 3

Perkembangan gerakan maksimalis di dunia (2020-2024)

Orientasi	
→	Maksimalis
←	Reformis
Intensitas	
↑	Naik
↓	Turun
●	Stagnan
Status	
✓	Sukses

Di Venezuela, Mauritania, Senegal, dan Indonesia, berbagai protes muncul seputar proses pemilihan presiden. Jika demonstrasi di Venezuela dan Mauritania dipicu dugaan kecurangan dan kurangnya transparansi pemilihan umum,<sup>43</sup> serta demonstrasi di Senegal diakibatkan penundaan pemilihan presiden,<sup>44</sup> tanda darurat muncul di Indonesia sebagai kritik terhadap cawe-cawe mantan presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum (lihat bab yang ditulis diah kusumaningrum dalam edisi ini).

Yang tak kalah menarik adalah yang melanda Israel. Menjelang penghujung 2024, aneka unjuk rasa yang tadinya hanya menuntut pemerintah memenuhi kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas mulai menyerukan tuntutan pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Aksi yang mengandalkan demonstrasi (metode #47), blokade jalanan (metode #171), dan pemogokan (metode #97) di berbagai kota ini penting disimak, bukan hanya dalam kaitannya dengan penegakan demokrasi di Israel, tetapi utamanya terkait genosida di Palestina.<sup>45</sup>

2024 memberi gambaran yang beragam. Sekilas, terlihat betapa mobilisasi besar-besaran dalam waktu cepat memungkinkan gerakan mencapai keberhasilan. Namun, telaah lebih dalam menunjukkan bahwa mobilisasi semacam itu bergantung pada pengalaman jatuh-bangun sebelumnya – termasuk pilihan mundur atau bertiarap untuk waktu tertentu. Di sini, refleksi dan pembelajaran terus-menerus, baik dari pengalaman masa lalu maupun pengalaman negara lain menjadi sangat penting. Petik apa yang perlu ditiru dan apa yang perlu diubah, lalu... bungkus!

---

43 Tiziano Breda, *"2024 Venezuela election protests: harsher repression at home and more global reach than in 2019"*, ACLED, 29 Agustus 2024; Rédaction Africanews dan AP News, *"At least three die in post-election protests in Mauritania"*, 13 Agustus 2024.

44 News Wires, *"Hundreds protest in Senegal to demand presidential elections before April 2"*, France 24, 2 Maret 2024.

45 Al Jazeera, *"Why are thousands protesting against Netanyahu's government in Israel?"*, 2 April 2024; Eve Young, *"Now is the time: Protestors call for significant action and civil disobedience"*, The Jerusalem Post, 27 Desember 2024.

انقلاب اسلامی  
مہینہ استوار

مردم ایران عشق اسلام، انقلاب اسلامی و رہبری هستند

مطیع امر رہبریم

**WE ARE OBEDIENT  
TO THE LEADER**

## Hidup Para Pemimpin!

### Mempertanyakan Aksi Pro-Rezim

*Daniel Petz, diterjemahkan oleh Dhanisa Salsha Handiani*

*dan dia kusumaningrum*

Umumnya, aksi nirkekerasan atau perlawanan sipil dipahami sebagai gerakan anti-rezim, sebagai alat menjatuhkan diktator dan pemerintahan otoriter. Namun, di tengah gelombang ketiga otokratisasi saat ini, kita semakin sering mendapati aktor-aktor otokratik menggunakan mobilisasi tanpa kekerasan guna mengkonsolidasikan kekuatannya. Pada titik ini, penting bagi kita menilik bagaimana aktor-aktor ini menggunakan (atau menyalahgunakan?) strategi tanpa kekerasan.

Di bab ini, saya mencoba menelaah bagaimana, mengapa, dan kapan aktor-aktor otokratik memanfaatkan metode tanpa kekerasan guna mendorong laju otokratisasi dan/atau mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Setelah menyajikan sedikit kajian literatur, saya mendiskusikan beberapa kasus, termasuk Hungaria di bawah Orban, Brasil di bawah Bolsonaro, dan Amerika Serikat di masa jabatan Trump yang pertama. Saya menempatkan pembahasan tersebut dalam kerangka 198 metode aksi nirkekerasan serta 7 taktik otokrat (lihat Kotak 3). Saya juga menilik kembali tulisan saya sebelumnya dalam refleksi tahunan Damai Pangkal Damai (DPD) 2021, yang mengangkat tiga ketegangan: antara kekerasan dan nirkekerasan, antara keberatan (*dissent*) dan pembangkangan (*disobedience*), serta antara cara dan tujuan.

Mengikuti kaidah yang dikembangkan akademisi dan praktisi di bidang ini, saya menggunakan istilah “tanpa kekerasan” (*non-violence*), alih-alih “nirkekerasan” (*nonviolence*) guna menggambarkan mobilisasi yang dilakukan para otokrat. Di dalamnya tersirat dan tersurat pengakuan bahwa sekalipun tidak menggunakan kekerasan, tujuan dari mobilisasi tersebut sering kali bertentangan dengan semangat keadilan sosial. Mobilisasi semacam ini biasanya diorganisir secara *top-down*, menggentet hak kelompok minoritas dan/atau termarjinalkan (*punching down*), serta bersifat pragmatis dan oportunistik—artinya, tidak punya masalah menggabungkan metode kekerasan ketika dibutuhkan. Dengan kata lain, mobilisasi semacam ini cenderung melanggengkan kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung, berkebalikan dengan semangat nirkekerasan untuk menghapus segala kekerasan.

### Kotak 3

Ada yang khas dari gelombang ketiga otokratisasi saat ini. Di dua gelombang sebelumnya (1920-1940an serta 1960-1970an), otokratisasi terjadi melalui kudeta militer, swa-kudeta, atau intervensi asing yang merongrong kekuasaan petahana. Sementara itu, di gelombang ketiga, otokratisasi justru lebih banyak didorong oleh petahana yang terpilih secara demokratis. Alih-alih langsung menghancurkan demokrasi, mereka secara perlahan tapi pasti memanfaatkan aneka lembaga dan mekanisme demokrasi guna melemahkan nilai-nilai demokrasi. Sekitar 70% kasus gelombang ketiga otokratisasi mengikuti pola ini.

Menurut "Buku Pedoman Otoritarianisme," para otokrat mengandalkan "taktik salami," di mana mereka melemahkan demokrasi melalui irisan-irisan "tipis," sedikit demi sedikit. Buku pedoman tersebut menjabarkan tujuh taktik utama para otokrat, yaitu (1) mempolitisasi lembaga-lembaga independen, (2) menyebarkan disinformasi, (3) memperkuat cengkraman eksekutif dengan mengorbankan prinsip *checks and balances*, (4) membungkam kritik dan perbedaan pendapat, (5) mengkambinghitamkan komunitas rentan atau terpinggirkan, (6) manipulasi pemilihan umum, dan (7) meningkatkan penggunaan kekerasan.

#### Sumber:

Jennifer Dresden, Aaron Baird, dan Ben Radestorf, *The Authoritarian Playbook* (Protect Democracy, 2022).

## Logika Mobilisasi Pro-Rezim di Rezim Otokratik

Meski rezim totaliter—seperti pemerintahan fasis di Italia dan pemerintahan Nazi di Jerman tahun 1930an—serta beberapa rezim komunis sering mengandalkan mobilisasi massa guna menopang kekuasaan mereka, sebagian besar rezim otokratik non-totaliter cenderung tidak menggunakan mobilisasi massa sebagai metode konsolidasi kekuasaan. Karenanya, tidak mengherankan jika jumlah penelitian mengenai mobilisasi pro-rezim, apalagi dengan metode tanpa kekerasan, sangatlah sedikit.

Satu dari sedikit penelitian itu adalah yang dilakukan oleh Hellmeier dan Weidman tentang demonstrasi (*rallies*) di rezim otoriter.<sup>1</sup> Mereka menggarisbawahi fakta bahwa mobilisasi massa bukanlah suatu hal yang lazim ditemukan di rezim otoriter—justru, rezim otoriter cenderung memiliki tingkat mobilisasi politik yang rendah. Di sini, model interaksi yang paling dominan antara pemerintah dan rakyat adalah "kepatuhan pasif, bukan dukungan aktif atau menunjukkan antusiasme."<sup>2</sup> Salah satu contohnya adalah Tiongkok, di mana mobilisasi massa dihambat melalui himbauan dan sensor. Meski begitu, dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat pula rezim otoriter yang mengizinkan, dan bahkan mendukung, demonstrasi, seperti Rusia, Iran, dan Turki.

Hellmeier dan Weidman berpendapat bahwa demonstrasi pro-rezim umumnya memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah unjuk kekuatan sang petahana, supaya tidak ada kekuatan baru maupun lama yang berani menantanginya, apalagi melalui kudeta militer. Yang kedua adalah merespons mobilisasi massa oleh oposisi politik, supaya tidak ada protes lebih jauh dan menjadikan "ongkos melawan" lebih tinggi daripada "ongkos patuh." Di sini, mobilisasi massa juga memastikan supaya war-

1 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, "Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 71-108.

2 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, "Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 73-74.

ga yang “netral” tidak terhasut untuk bergabung dengan kubu oposisi, sehingga mempertahankan spektrum sekutu yang ada.<sup>3</sup> Hellmeier dan Weidman juga berargumen bahwa demonstrasi pro-rezim lebih mungkin digelar ketika penggunaan metode-metode koersif diprediksi justru menimbulkan serangan balasan pada rezim.<sup>4</sup>

Meski demikian, kedua peneliti ini menggarisbawahi bahwa mobilisasi massa bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi para otokrat, apalagi jika mereka tidak yakin seberapa besar tingkat dukungan terhadap rezim serta seberapa besar kapasitas pengorganisasian rakyat. Menggelar unjuk rasa tandingan terhadap gerakan oposisi juga berisiko menimbulkan bentrokan dan kekerasan di jalanan, sehingga menuntut biaya demobilisasi yang signifikan dari rezim.<sup>5</sup>

Meningkatnya mobilisasi pro-rezim juga dapat terjadi sebagai respons terhadap munculnya gelombang kampanye maksimalis, terutama di negara-negara tetangga. Selain guna menghalangi kudeta, Koesel dan Bunche<sup>6</sup> berpendapat bahwa mobilisasi pro-rezim biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa gerakan-gerakan pro-demokrasi di negara tetangga tidak “menyebarkan” (*diffused*) ke negara mereka, seperti yang terjadi pada Revolusi Warna (*Color Revolution*), istilah bagi gerakan-gerakan maksimalis di Balkan dan beberapa negara lain).

Koesel dan Bunche mengidentifikasi sejumlah strategi “anti-difusi,” termasuk sensor dan propaganda anti-Revolusi Warna, tuntutan hukum dan intimidasi guna menghalangi konsolidasi oposisi, serta membentuk “partai oposisi virtual” guna memecah kubu oposisi.<sup>7</sup> Strategi anti-difusi lainnya adalah menyetir gerakan kelompok muda. Pemerintah Rusia, misalnya, memfasilitasi tumbuhnya gerakan pemuda pro-Kremlin guna mempromosikan patriotisme Rusia, nilai-nilai negara, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>8</sup> Kelompok muda ini merancang aneka kegiatan termasuk pelatihan menangkal Revolusi Warna: “Dengan kode Poligon (latihan tembak), anggota kelompok tersebut melakukan latihan militer, mengorganisir unjuk rasa pro-pemerintah, menangkis serangan oposisi, dan mengambil alih stasiun TV lokal guna mencegah perebutan kekuasaan oleh Revolusi Warna.”<sup>9</sup> Strategi yang sama juga ditemukan di Belarus, di mana Presiden Lukashenko merekrut mahasiswa untuk bergabung dalam Belorussian Republican Youth Union dan mengorganisir aksi massa guna membendung persebaran Revolusi Warna.

---

3 Boyd Andrew dan Mitchell Dave Oswald, *Beautiful Trouble: A Toolbox for Revolution* (New York: OR Books, 2012).

4 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes,” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 73.

5 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes,” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 73.

6 Karrie J. Koesel dan Valerie J. Bunce, “Diffusion-proofing: Russian and Chinese responses to waves of popular mobilizations against authoritarian rulers,” *Perspectives on Politics*, no. 11 (2013): 753-768.

7 Karrie J. Koesel dan Valerie J. Bunce, “Diffusion-proofing: Russian and Chinese responses to waves of popular mobilizations against authoritarian rulers,” *Perspectives on Politics*, no. 11 (2013): 757.

8 Karrie J. Koesel dan Valerie J. Bunce, “Diffusion-proofing: Russian and Chinese responses to waves of popular mobilizations against authoritarian rulers,” *Perspectives on Politics*, no. 11 (2013): 758.

9 Karrie J. Koesel dan Valerie J. Bunce, “Diffusion-proofing: Russian and Chinese responses to waves of popular mobilizations against authoritarian rulers,” *Perspectives on Politics*, no. 11 (2013): 758.

Tidak semudah itu bagi pemerintahan otoriter mengorganisir aksi pro-rezim. Karena minimnya kebebasan berpendapat dan pemilihan umum yang bebas, rezim otokratik biasanya kesulitan mengukur seberapa besar “dukungan sejati” terhadap mereka. Tidak ada jaminan berapa orang yang akan berpartisipasi dalam aksi pro-rezim—padahal kalau pesertanya hanya sedikit, ada kemungkinan bahwa dukungan terhadap oposisi meningkat. Menurut Hellmeier dan Weidman, inilah mengapa rezim otokratik mengembangkan tiga strategi, yaitu (1) menyediakan insentif khusus, (2) merekrut peserta aksi dari kalangan organisasi pro-rezim, dan/atau (3) menyebarkan propaganda.<sup>10</sup> Insentif khusus dapat berupa imbalan finansial bagi yang berpartisipasi dan hukuman bagi yang menolak berpartisipasi. Di Ukraina misalnya, beberapa pengunjuk rasa Antimaidan dibayar. Lalu, pegawai negeri serta pelajar dan mahasiswa sekolah negeri didorong ikut demonstrasi pro-rezim. Selain itu, pemerintah gencar menyuarakan propaganda, termasuk seruan nasionalis dan anti-minoritas. Di Rusia, protes sering diselenggarakan di tempat-tempat yang menyimbolkan sentimen nasional serta disokong berbagai media propaganda pemerintah.<sup>11</sup> Sentimen-sentimen agama juga kerap dimainkan dalam aksi pro-rezim. Contohnya, guna menangkal perlawanan nirkekerasan yang mengecam kematian Masha Amini, pemerintah Iran mengerahkan massa yang mendukung aturan berpakaian konservatif dan pemakaian hijab untuk turun ke jalanan di ibu kota Tehran serta beberapa kota lain seperti Ahvaz, Isfahan, Qom, dan Tabriz.<sup>12</sup>

Berpegangan pada Mass Mobilization in Autocracies Database (MMAD), Hellmeier dan Weidmann menyajikan analisis kuantitatif yang menarik. MMAD merupakan pangkalan data berisi informasi tentang pertemuan publik, yang melibatkan setidaknya 25 peserta, guna menyatakan dukungan politik terhadap pemerintah pusat, daerah, maupun desa.<sup>13</sup> Mereka menemukan bahwa demonstrasi pro-rezim paling banyak digelar oleh Putin (446 kali), diikuti oleh Ahmadinejad di Iran (179 kali), Al-Assad di Suriah (117 kali), serta Chavez dan Maduro di Venezuela (41 kali).<sup>14</sup> Jumlah demonstrasi pro-rezim yang signifikan juga ditemukan di bawah pemerintahan Aristide di Haiti, Kim Jong Un di Korea Utara, Castro di Kuba, Hazina di Bangladesh, dan Tantawi di Mesir. Artinya, baik rezim berhaluan kanan maupun kiri sama-sama menggunakan strategi mobilisasi massa.

Selain itu, mereka menemukan bahwa jumlah mobilisasi pro-rezim memuncak selama krisis nuklir di Iran pada awal tahun 2006, Arab Spring pada tahun 2011 dan 2012, setelah pemilihan umum Rusia yang kontroversial pada akhir tahun 2011, serta masa aneksasi Krimea pada tahun 2014. Sepertiga dari semua aksi pro-rezim digelar guna menandingi mobilisasi di

---

10 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, *"Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 82.

11 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, *"Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 82.

12 Stuart Williams, *"Thousands attend government-backed pro-hijab rallies in Iran,"* Times of Israel, 23 September 2022.

13 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, *"Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 85.

14 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, *"Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes," Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 71-108.

kalangan oposisi. Meski jumlah aksi pro-rezim cukup signifikan, tidak tampak ada peningkatan jumlah sepanjang 10 tahun cakupan observasi pangkalan data tersebut.<sup>15</sup>

Hellmeier dan Weidman juga menemukan yang paling sering menggelar aksi pro-rezim adalah rezim dengan partai tunggal dan rezim militer, diikuti oleh rezim multipartai—yang paling sedikit menggelarnya adalah negara-negara monarki.<sup>16</sup> Temuan menarik lainnya adalah bahwa aksi pro-rezim jarang ditemukan saat perekonomian negara sedang baik. Artinya, pemerintah cenderung memobilisasi massa pro-rezim ketika ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, demonstrasi pro-rezim juga lebih sering terjadi di bawah pemerintahan yang memiliki kecenderungan koersif saat menangani kerusuhan.<sup>17</sup>

Dibanding demonstrasi anti-rezim, aksi pro-rezim lebih sering mengakibatkan luka-luka di kalangan penonton, aktivis oposisi, bahkan petugas polisi—sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis demonstrasi dalam hal kerusakan bangunan, kendaraan, dan fasilitas umum.<sup>18</sup> Hellmeier dan Weidmann menduga bahwa ini dikarenakan rezim otoriter memang mendorong pendukungnya melakukan kekerasan terhadap para demonstran anti-pemerintah, atau setidaknya menyiratkan bahwa negara tidak akan menjatuhkan hukuman jika mereka melakukannya. Meski aparat keamanan sering hadir dalam demonstrasi pro-pemerintah, mereka biasanya tidak melakukan intervensi. Pun melakukan intervensi, mereka tidak menggunakan kekerasan mematikan (*lethal violence*) terhadap demonstran pro-pemerintah—kontras dengan fakta bahwa negara biasanya tidak segan menggunakan kekerasan saat menangani demonstrasi anti-pemerintah. Kembali pada tulisan saya sebelumnya mengenai aksi tanpa kekerasan di kalangan sayap kanan, kita patut mempertanyakan komitmen dan ideologi nirkekerasan di kalangan massa pro-rezim.<sup>19</sup> Penting juga mengingat bahwa salah satu misi massa pro-rezim adalah menghasut demonstran anti-pemerintah supaya meninggalkan disiplin nirkekerasan dan melakukan kekerasan. Ini adalah langkah penting untuk nantinya menjustifikasi represi negara terhadap demonstran anti-pemerintah yang dilabel “penuh kekerasan.”

Satu contoh di mana massa pro-rezim menggunakan kekerasan adalah di Bangladesh pada tahun 2024, di mana pemerintah memobilisasi organisasi mahasiswa pro-pemerintah, Chhatra League, guna membubarkan protes nirkekerasan mahasiswa.<sup>20</sup> Di berbagai kesempatan, polisi dan aparat keamanan hanya berdiam diri selama para demonstran pro-pemerintah menyerang gerakan mahasiswa, dan akibatnya, sejumlah pengunjuk rasa terbunuh.<sup>21</sup>

15 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “*Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes.*” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 85.

16 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “*Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes.*” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 90.

17 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “*Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes.*” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 87.

18 Sebastian Hellmeier dan Nils B. Weidmann, “*Pulling the Strings? The Strategic Use of Pro Government Mobilization in Authoritarian Regimes.*” *Comparative Political Studies* 53, no. 1 (2020): 71-108.

19 Daniel Petz, “*The Dark Side of Nonviolent Action? Right-wing Populism and the Use of Nonviolent Action.*” *Populism*, no. 4: 221-244.

20 Redwan Ahmed dan Hannah Ellis-Petersen, “*Bangladesh student protests turn into ‘mass movement against a dictator.’*” *The Guardian*, 26 Juli 2024.

21 *Le Monde*, “*Bangladesh protesters demand PM resign as death toll mounts.*” 4 Agustus 2024.

Untungnya, mobilisasi oleh pemerintah ini gagal dan perlawanan mahasiswa pun berhasil menggulingkan rezim Hasina—sebagaimana dibahas dalam bab yang ditulis oleh Dhania Salsha Handiani di dalam monograf ini.

Fenomena yang sama ditemukan dalam protes Euromaidan di Ukraina, di mana pemerintah mengerahkan pasukan pro-rezim “Titushky” guna menyerang pengunjuk rasa dan warga, serta menunjukkan dukungan terhadap unit polisi anti huru-hara. Selama kejadian, beberapa anggota pasukan menyamar sebagai demonstran anti-pemerintah guna memicu penggunaan kekerasan dan memperburuk situasi. Berdasarkan temuan Global Informality Project, anggota Titushky terdiri atas pemuda pengangguran dan/atau dari kelas pekerja, banyak di antaranya memiliki catatan kriminal. Beberapa di antara mereka juga merupakan anggota polisi yang sedang tidak bertugas, petugas keamanan negara, anggota klub olahraga tarung, buruh perusahaan milik pemerintah, anggota geng kriminal, narapidana, dan penggemar sepak bola. Beberapa bukti menunjukkan bahwa kelompok Titushky didanai oleh oligarki pro-pemerintah.<sup>22</sup>

Kasus-kasus di atas memberikan gambaran menarik mengenai mobilisasi pro-rezim di berbagai negara otoriter selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, rezim otokratik tampaknya mendukung adanya mobilisasi massa ketika merasa terancam—terutama di masa-masa sebelum pemilu, pada saat dipertemukan oleh kekuatan oposisi, atau ketika negara-negara tetangga dilanda gelombang kampanye maksimalis yang dapat memicu kampanye serupa di negara-negara mereka. Mobilisasi ini tidak terjadi secara organik dan biasanya direncanakan sedemikian rupa sehingga menghindari terjadinya represi terbuka. Selain itu, mobilisasi pro-rezim memiliki peran penting dalam memberikan sinyal dukungan terhadap rezim, melawan gerakan oposisi (baik dengan kekerasan maupun nirkekerasan), dan mencegah warga yang “netral” untuk mengambil sikap anti-pemerintah. Karena pendirian non-ideologis mereka, gerakan anti-pemerintah biasanya memiliki komitmen yang rendah terhadap disiplin nirkekerasan, bahkan memiliki tendensi untuk melakukan provokasi kekerasan. Secara garis besar, kita dapat berargumen bahwa demonstrasi pro-pemerintah adalah sebuah upaya untuk meniru gerakan nirkekerasan, dengan tujuan spesifik mendukung rezim, sembari memberikan sinyal terhadap berbagai lapisan masyarakat.

## **Mobilisasi Massa Pro-Rezim di Tengah Kemunduran Demokrasi**

Bagian ini mengetengahkan kasus Amerika Serikat di bawah periode pertama Trump (2017-2021), Brasil di bawah Bolsonaro (2019-2023), Hungaria di bawah Orban (2010-saat ini), serta beberapa lainnya, di mana mobilisasi pro-rezim terjadi di negara yang sedang mengalami kemunduran demokrasi. Jika penelitian sebelumnya cenderung fokus pada metode demonstrasi saja, saya mencoba membahas juga penggunaan metode-metode tanpa kekerasan lain oleh kelompok pro-rezim.

---

<sup>22</sup> Michal Pszyk, “*Titushky (Ukraine)*,” Global Informality Project, 11 Mei 2020.

Ada beberapa karakter yang membedakan negara-negara yang demokrasiya sedang mundur dengan yang sudah sepenuhnya menjadi otokrasi. Pertama, meski bersimpati kepada pemerintah, aparat keamanan seperti polisi dan militer biasanya belum sepenuhnya patuh kepada rezim yang berkuasa. Kedua, sistem *checks and balances* melalui parlemen, lembaga peradilan, media, oposisi, dan masyarakat sipil masih cukup berdaya. Karenanya, mobilisasi pro-rezim tidak semudah itu dilakukan—ada risiko dorongan balik, apalagi jika aksi berujung pada kekerasan.

**Amerika Serikat dan Brasil.** Ada beberapa persamaan menarik antara kepresidenan Trump dan Bolsonaro. Menurut McKenna dan O'Donnell, keduanya mengandalkan "*satellite political movements*"<sup>23</sup> atau gerakan akar rumput yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan berusaha mempertahankan dan mengembalikan kekuasaan ke tangan "pemimpin" mereka. Gerakan semacam ini menguntungkan pemimpin populis sayap kanan karena dapat merengkuh massa di luar konstituen partai politik tanpa harus bertanggung jawab langsung sekiranya massa tersebut melakukan tindakan-tindakan radikal dan/atau kekerasan.<sup>24</sup> Persamaan lain Trump dan Bolsonaro adalah keduanya dikritik seputar buruknya penanganan COVID-19, keduanya gagal memenangkan periode berikutnya, dan keduanya sempat menggelorakan pemberontakan—meski gagal.

Pada periode pertama kepemimpinan Trump, mobilisasi kelompok sayap kanan naik secara signifikan. Salah satu yang paling kontroversial adalah demonstrasi tahun 2017 yang digelar kelompok supremasi kulit putih, neo-Konfederat, neo-Nazi, dan milisi sayap kanan sebagai satu kesatuan "*alt-right*" yang memprotes pengusuran monumen Konfederasi di Charlottesville. Demonstrasi ini berujung kerusuhan dan pembunuhan seorang pengunjung rasa oleh salah satu anggota kelompok supremasi kulit putih. Menanggapi hal ini, Trump mengatakan bahwa di kedua kubu ada "orang-orang sangat baik," menyiratkan dukungannya terhadap kelompok sayap kanan dan keengganannya menindak mereka.<sup>25</sup> Lalu, pada tahun 2020, kelompok sayap kanan Amerika Serikat menggelar demonstrasi besar-besaran guna menentang pembatasan COVID-19, memukul mundur gerakan Black Lives Matter (BLM), serta memprotes kekalahan Trump dalam pemilihan umum, dengan klaim terjadinya kecurangan masif.

Protes mengenai pembatasan COVID-19 terjadi di berbagai negara bagian sepanjang tahun 2020. Demonstrasi dilakukan dengan membangkang aturan *lockdown* dan penggunaan masker, yang dinilai membatasi kebebasan individu. Dengan dukungan Trump, pengunjung rasa bersenjata sempat menduduki gedung DPR di Michigan guna menuntut dihapusnya aturan tinggal di rumah selama COVID-19 yang ditetapkan oleh gubernur.<sup>26</sup> Dalam memukul mundur gerakan BLM, kelompok sayap kanan beralih sedang mengadakan bangkitnya "gerakan Anti-

23 Elizabeth McKenna dan Catharina O'Donnell, "*Satellite Political Movements: How Grassroots Activists Bolster Trump and Bolsonaro in the United States and Brazil*," *American Behavioral Scientist* 68, no. 13 (2024): 1782–1803.

24 Elizabeth McKenna dan Catharina O'Donnell, "*Satellite Political Movements: How Grassroots Activists Bolster Trump and Bolsonaro in the United States and Brazil*," *American Behavioral Scientist* 68, no. 13 (2024): 1795.

25 Kenneth T. Andrews, Neal Caren, dan Todd Lu, "*Racial, ethnic, and immigration protest during year one of the Trump presidency*," dalam *Racialized Protest and the State*, ed. Hank Johnston dan Pamela Oliver (Routledge, 2020), 208-226.

26 Abigail Censky, "*Heavily Armed Protesters Gather Again At Michigan Capitol To Decry Stay-At-Home Order*," NPR, 14 Mei 2020.

fa." Bergandengan tangan dengan polisi, dan beralih melindungi bisnis dan properti, mereka turun ke jalan menandingi BLM. Kelompok ini menjadi ujung tombak kampanye Trump. Pada akhir September 2020, sekitar 1.000 anggota Proud Boys dan pendukung Trump berkumpul di Delta Park di Portland, Oregon, guna menggelar demonstrasi "End Antifa" menyerukan supaya Trump terpilih sehingga dapat membasmi "terorisme dalam negeri."<sup>27</sup> Menyusul tuduhan kecurangan pemilihan umum yang disuarakan Trump, demonstrasi pun muncul di berbagai daerah. Salah satu yang paling signifikan adalah Million MAGA March di Washington, D.C., yang diikuti ribuan pengunjung rasa. Beberapa pengamat berargumen ini adalah cikal bakal "kerusuhan," "kudeta," "swakudeta," "pemberontakan," atau penyerbuan dan pendudukan Gedung Capitol AS di Washington, D.C., pada tanggal 6 Januari 2021.<sup>28</sup> Dimulai dengan pawai dan demonstrasi, pendukung Trump mendisrupsi pertemuan parlemen yang tengah mengesahkan kemenangan Presiden Joe Biden. Setidaknya lima orang terbunuh dalam aksi pendudukan tersebut.<sup>29</sup> Pemberontakan ini dinilai gagal, di mana sejumlah peserta (termasuk Trump) didakwa bersalah, dan beberapa di antaranya (tidak termasuk Trump) dijatuhi hukuman.

Sama seperti Trump, Bolsonaro banyak dikritik terkait penanganan pandemi COVID-19, termasuk melalui demonstrasi massal anti-pemerintah pada bulan Juni 2021. Saat Kongres dan Mahkamah Agung melakukan penyelidikan terhadapnya, Bolsonaro menyuruh pendukungnya melakukan "kudeta balasan" terhadap kedua lembaga tersebut.<sup>30</sup> Selain unjuk rasa di berbagai kota besar, beberapa pengemudi truk menunjukkan dukungan dengan memblokade jalanan di 15 dari 27 negara bagian Brasil. Selama melakukan aksi tersebut, para pengemudi memegang poster bertuliskan "Intervensi militer demi kekuasaan Bolsonaro" dan "Penjarakan hakim Mahkamah Agung yang korup."<sup>31</sup> Blokade ini akhirnya bubar atas perintah Bolsonaro, setelah khawatir akan dampak negatifnya terhadap perekonomian Brasil.

Serupa Trump, Bolsonaro juga mendorong mobilisasi kelompok sayap kanan yang, menurut sebuah penelitian oleh Neto, banyak menggunakan strategi "Ukraina-isasi."<sup>32</sup> Mereka mengaku terinspirasi kelompok sayap kanan dalam protes Euromaidan 2013/2014 di Ukraina. Bagi mereka, Ukrainaisasi berarti inkorporasi taktik kekerasan guna menimbulkan ketegangan dan membersihkan lawan-lawan politik. Muncullah aksi "300 Brazil" yang menarget para hakim agung. Mereka mendasarkan aksi ini pada interpretasi *ngawur* terhadap Pasal 142 Konstitusi Brasil yang "membolehkan" intervensi militer terhadap lembaga legislatif dan yudikatif.<sup>33</sup> Menurut Neto, tujuan utama aksi di atas adalah menciptakan iklim penuh ketegangan, sehingga memprovokasi presiden baru menerapkan Pasal 142 yang memungkinkan angkatan bersenjata mengontrol keamanan publik dan menetapkan pemerintahan militer.<sup>34</sup>

27 Hampton Stall, Roudabeh Kishi, dan Clionadh Raleigh, "*Standing By: Right-Wing Militia Groups and the United States Election*," Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 21 Oktober 2020.

28 Timothy Snyder, "*The American Abyss*," The New York Times, 9 Januari 2021.

29 Bloomberg Businessweek, "*The Trashing of American Democracy*," 7 Januari 2021.

30 Chris Jewers, "*Truckers block Brazil's freeways in support of embattled President Bolsonaro as he fires up his support base amid claims he could be preparing a military coup*," The Daily Mail, 9 September 2021.

31 Deutsche Welle, "*Brazil: Pro-Bolsonaro truckers end blockade*," 9 Oktober 2021.

32 Odilon Caldeira Neto, "*Bolsonarismo, a Phenomenon of Brazil's Own Making?*," *NACLA Report on the Americas* 56, no. 1 (2024): 56-63.

33 Odilon Caldeira Neto, "*Bolsonarismo, a Phenomenon of Brazil's Own Making?*," *NACLA Report on the Americas* 56, no. 1 (2024): 59.

34 Odilon Caldeira Neto, "*Bolsonarismo, a Phenomenon of Brazil's Own Making?*," *NACLA Report on the Americas* 56, no. 1 (2024): 63.

Menyusul kekalahan Bolsonaro dari Lula da Silva, pada tanggal 8 Januari 2023, ribuan pendukung Bolsonaro menyerbu Istana Kepresidenan Brasil, Gedung Kongres, dan Gedung Mahkamah Agung dalam upaya terkoordinasi untuk membatalkan hasil pemilihan presiden.<sup>35</sup> Namun, pemberontakan ini gagal, di mana ratusan pendukung Bolsonaro ditangkap dan diadili. Bolsonaro juga ikut diperiksa dan didakwa, salah satunya karena merencanakan kudeta militer pada tahun 2022.<sup>36</sup>

**Hungaria.** Di bawah kepemimpinan Orban, Hungaria secara konsisten mengalami otokratisasi. Supremasi hukum dilemahkan melalui reformasi peradilan dan media, disokong dengan propaganda anti-imigran dan anti-LGBTQ dari pemerintah, serta propaganda nasionalis bahwa kedaulatan Hungaria lebih tinggi dari standar HAM dan demokrasi Uni Eropa.

Meskipun beberapa perlawanan nirkekerasan muncul, Hungaria menyaksikan cukup banyak mobilisasi pro-rezim. Selama empat tahun risetnya, Susánszky dkk. (2016) mencatat adanya protes-protes pro-rezim yang dihadiri lebih dari 100.000 peserta.<sup>37</sup> Penelitian Susánszky dkk. menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, mayoritas pengunjuk rasa pro-rezim benar-benar puas dengan kebijakan pemerintah, aktif dalam kegiatan sosial dan politik (sebagian besar melalui organisasi masyarakat sipil yang bersifat keagamaan dan nasionalis), serta secara rutin mengonsumsi media sayap kanan tanpa mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelompok politik sayap kanan. Kedua, aksi pro-rezim digawangi oleh "massa laki-laki" (*mass men*) yang dengan rela meminggirkan agensi mereka untuk patuh pada arahan dan narasi.<sup>38</sup> Ketiga, meski ada di bawah propaganda pemerintah, tidak ada bukti bahwa partisipasi mereka didasarkan keterpaksaan ataupun insentif finansial. Mobilisasi pro-rezim di Hungaria pun dapat dinilai "sukses," di mana referendum 2016 mengenai migran Uni Eropa pada memperoleh mayoritas suara (98%) meski tidak memenuhi ambang batas partisipasi 50%, serta pemerintahan Orban berhasil terpilih kembali pada tahun 2018.<sup>39</sup> Belakangan, kekuasaan Orban ditantang oleh Péter Magyar. Meski menggelar kembali Peace March pada menjelang pemilihan Parlemen Eropa tahun 2024, FIDESZ kehilangan 44% suara, sebuah hasil yang mengecewakan bagi partai Orban.

**Lainnya.** Ada beberapa contoh lain mobilisasi pro-rezim di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Menyusul protes anti-pemerintah yang mengancam penembakan massal di Serbia, Presiden Aleksandar Vučić menggelar demonstrasi pro-rezim di ibu kota, mengklaim adanya politisasi tragedi tersebut oleh pihak oposisi.<sup>40</sup> Di Turki, Presiden Erdogan sering memobilisasi massa, termasuk menggalang dukungan dari diaspora Turki di berbagai

35 Katie Polglase, Gianluca Mezzofiore, Tara John, dan Rodrigo Pedrosa, "*Command your troops, damn it! How a series of security failures opened a path to insurrection in Brazil.*" CNN, 14 Januari 2023.

36 Diane Jeantet dan Diarlei Rodrigues, "*Brazil observes anniversary of the anti-democratic uprising in the capital.*" AP News, 9 Januari 2024; Amy Walker, "*Brazil police formally accuse Bolsonaro of alleged coup plot.*" BBC, 22 November 2024.

37 Pál Susánszky, Akos Kopper, dan, Gergely Tóth, "*Pro-government demonstrations in Hungary – citizens' autonomy and the role of the media.*" *East European Politics* 32, no. 1 (2016): 63–80.

38 Pál Susánszky, Akos Kopper, dan, Gergely Tóth, "*Pro-government demonstrations in Hungary – citizens' autonomy and the role of the media.*" *East European Politics* 32, no. 1 (2016): 74.

39 Andrew Macdowall, "*Voters back Viktor Orbán's rejection of EU migrant quotas.*" Politico, 2 Oktober 2016.

40 Dusan Stojanovic, "*Pro-government rally held in Serbia amid growing discontent after mass shootings.*" AP News, 27 Mei 2023.

negara Eropa, seperti Jerman dan Austria.<sup>41</sup> Pada tahun 2013, beberapa kelompok agama dan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintah memimpin rangkaian protes pro-Morsi guna mengutuk kudeta militer di Mesir. Di sini, massa mengekspresikan ketakutan mereka atas intervensi militer Turki (yang menghasilkan upaya kudeta gagal pada tahun 2016), sembari merespons protes anti-pemerintah Geci yang sedang berlangsung. Menyusul serangkaian aksi teror di Turki menjelang pemilu 2015, Erdogan pun menggelar demonstrasi “anti-teror” di Istanbul yang menarik lebih dari 100.000 pendukung.<sup>42</sup> Data terbaru dari Kahvecioğlu et al. menunjukkan bahwa, meski protes anti-pemerintah lebih sering terjadi dibandingkan protes pro-pemerintah, jumlah demonstrasi pro-rezim antara tahun 2013 dan 2016 mencapai ratusan.<sup>43</sup>

Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat adanya kemiripan antara gerakan pro-rezim di negara yang baru mengalami otokratisasi dan di negara yang sudah otoriter. Di kedua skenario, aktor otokratik menggelar mobilisasi massa sebagai respons terhadap mobilisasi anti-rezim dan/atau ketika merasa terancam—biasanya ketika lembaga legislatif atau yudikatif menjalankan peran *checks and balances*, atau ketika ada gerakan di negara tetangga yang ditakutkan “menular” ke dalam negeri.

Ada pula variasi di antara gerakan-gerakan pro-rezim. Dalam hal mobilisasi misalnya, Trump dan Bolsonaro mengandalkan politik satelit yang melibatkan kelompok dan individu sayap kanan dari akar rumput dibandingkan anggota partai politik mereka sendiri. Kedua gerakan mencapai titik terendah saat petahana kalah dalam pemilihan presiden, mengingkari hasil pemilihan umum, lalu secara serampangan mengerahkan massa—yang berujung pada kekerasan di jalanan dan kegagalan gerakan mencapai tujuan. Sementara itu, Orban tampaknya lebih berhasil mengorganisir mobilisasi massa pro-rezim yang berkelanjutan. Di awal masa jabatannya, Orban sangat populer sehingga dapat dengan mudah menarik dukungan sejati banyak orang, tanpa harus memaksa ataupun memberi imbalan, serta tanpa harus banyak bergantung pada kelompok sayap kanan. Sebagai “otokrat baru” di sebuah negara demokratis, di mana hasil survei dan pemilihan umum cenderung akurat, ia bisa memperhitungkan dengan baik besarnya dukungan sejati dari rakyat.

Dalam hal repertoar, gerakan pro-rezim cenderung tidak kreatif, hanya mengandalkan metode unjuk rasa dan pawai, dengan tambahan blokade jalanan oleh pengemudi truk di Brasil. Sepintas, ada kesamaan dengan gerakan maksimalis, di mana gerakan pro-rezim juga menyerbu dan menduduki kantor-kantor pemerintah. Bedanya, penyerbuan oleh gerakan pro-rezim biasanya diinisiasi secara spontan oleh beberapa individu yang bukan aktor inti gerakan, yang mencoba “meniru” repertoar dan dramaturgi gerakan maksimalis. Namun, karena tidak ada perencanaan dan pengorganisasian *bottom-up* yang rapi, penyerbuan dan pendudukan ini seringkali berubah kekerasan dan kekacauan, sehingga berbalik melemahkan dan mematikan gerakan pro-rezim.

41 BBC, “Thousands march in Germany in support of Turkey’s President Erdogan,” 31 Juli 2016.

42 Agence France-Presse, “More than 100,000 gather for pro-Erdogan rally in Istanbul,” The Guardian, 20 September 2015.

43 Anil Kahvecioğlu, Tijen Demirel-Pegg, dan Ilker Aytürk, “Introducing the Turkey Protest, Repression, and Pro-Government Rally Dataset (TPRPGRD),” *Southeast European and Black Sea Studies* 23, no. 2(2023): 385–408.

Sudah banyak aktor otokratik yang paham akan cara kerja mobilisasi massa nirkekerasan, yang merupakan kunci kesuksesan gerakan maksimalis. Mereka pun secara selektif memasukkan logika “tanpa kekerasan” ke dalam strategi-strategi konsolidasi kekuasaan, terutama menjelang pemilihan umum dan merespons gerakan maksimalis. Aktor otokratik yang sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan, seperti Orban dan Erdogan, relatif lebih mudah memobilisasi massa. Aktor otokratik yang belum ada, atau belum lama ada, di dalam lingkaran kekuasaan, seperti Trump dan Bolsonaro, perlu mengandalkan individu dan kelompok akar rumput yang biasanya ada di “pinggiran” (*fringe*) proses politik—dan karenanya tidak seterorganisir itu untuk mampu menjegal kandidat yang mengalahkan petahana dalam pemilihan umum. Juga, Orban dan Erdogan berangkat dari dalam proses dan partai politik arus utama, sedangkan Trump dan Bolsonaro merupakan pemimpin populis yang berangkat dari luar politik arus utama.

## Lalu Apa?

Ada setidaknya lima hal yang dapat dipetik dari pembahasan di atas. Pertama, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Chenoweth, efektivitas gerakan maksimalis pro-demokrasi menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>44</sup> Bisa jadi, salah satu alasannya adalah *autocratic learning*, di mana aktor-aktor otokratik belajar mengenai efektivitas strategi “nirkekerasan,” lalu menerapkan aspek “tanpa kekerasan” ke dalam strategi otokratik mereka. Karenanya, gerakan-gerakan pro-demokrasi perlu mempelajari dan mengantisipasi mobilisasi tandingan dari kelompok-kelompok otokratik.

Kedua, kita perlu melihat mobilisasi massa pro-rezim sebagai bukan sebagai penanda kuatnya rezim, namun justru sebagai penanda bahwa rezim sedang (merasa) lemah. Rezim sedang merasa terancam, atau sedang merasa tidak strategis jika menggunakan represi terbuka, dan karenanya menggunakan mobilisasi massa tanpa kekerasan—yang jika berubah menjadi kekerasan, dapat dengan mudah dikambinghitamkan kepada pihak lain.

Ketiga, gerakan-gerakan pro-demokrasi perlu berhati-hati terhadap provokasi menggunakan kekerasan, karena ini berpeluang menjustifikasi “respons” kekerasan oleh negara.

Keempat, gerakan pro-rezim biasanya meniru repertoar dan dramaturgi gerakan maksimalis. Sebagai sebuah “tiruan,” dasar pengorganisasian gerakan tanpa kekerasan oleh kelompok-kelompok otokratik cenderung lebih lemah. Daya gedor, daya tahan, serta disiplin nirkekerasan yang lemah memungkinkan gerakan pro-rezim untuk berubah menggunakan strategi kekerasan.

Kelima, seperti dalam kasus Bolsonaro dan Trump, mobilisasi massa pro-rezim tidak selalu berhasil. Dua tokoh tersebut gagal memenangkan pemilihan umum periode berikutnya—meski kini Trump kembali berkuasa. Mengingat bahwa gelombang otokratisasi masih terus berlangsung, penting bagi kita untuk terus memahami, mengkaji, dan melawan mobilisasi massa pro-rezim otoriter.

<sup>44</sup> Erica Chenoweth, “*The Future of Nonviolent Resistance*,” *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 69-84.



AR

## Unarmed Civilian Protection: Radikal atau Masuk Akal?

*Huibert Oldenhuis, diterjemahkan oleh diah kusumaningrum*

“Semua yang bekerja untuk HAM ditarget dan diusir supaya tidak ada saksi terhadap kesewenangan aparat.”<sup>1</sup> Demikian peringatan yang dikeluarkan Amnesty International tahun 2000, yang menggarisbawahi bahwa sudah tidak mungkin lagi pembela hak asasi manusia (HAM) dapat bekerja dengan aman di Aceh. Meski ada yang kemudian mengamankan diri dengan bersembunyi, beberapa pembela HAM melakukan sebaliknya. Mereka memperkuat pengamanan diri justru dengan menjadikan diri mereka lebih terlihat—dengan melangkah maju, dan bukannya mundur.

Bagian dari strategi pengamanan para pembela HAM ini adalah dengan mengundang relawan internasional dari Peace Brigades International (PBI) guna menyaksikan ancaman yang mereka terima. Para relawan ini duduk di depan rumah pembela HAM, dan menemani ke manapun mereka pergi, 24 jam sehari selama beberapa minggu. Kehadiran para relawan terlihat jelas saat pembela HAM menghadiri rapat, persidangan, demonstrasi, bahkan saat turun ke pelosok guna mengumpulkan testimoni korban kekerasan. Para relawan PBI tidak ikut serta dalam demonstrasi ataupun menyerukan solusi tertentu guna menyelesaikan konflik. Secara sengaja, mereka duduk di luar pintu saat pembela HAM rapat di dalam ruangan, guna menggarisbawahi bahwa mereka bukan pihak asing yang “mengajari” warga lokal cara menyelesaikan konflik.

Bukan berarti para relawan ini aktor pasif. Secara strategis, mereka menempatkan diri di wilayah-wilayah rawan. Ini adalah pesan bagi calon pelaku kekerasan bahwa agresi mereka akan ada saksi dan sanksinya. Para relawan membangun hubungan dengan aparat keamanan dan aktor-aktor penting lain guna mengurangi kecurigaan. Seorang mantan relawan PBI mengatakan, “Pernah ada beberapa insiden di mana anggota organisasi yang kami dampingi ditangkap. Teman dan keluarga mereka tidak tahu di mana lokasi penahanannya. Dengan pendekatan diplomatis, PBI dapat mencari tahu lokasi tersebut dan mengupayakan pembebasan.”<sup>2</sup> Situasi semacam ini, di mana sekelompok warga sipil tak bersenjata mengamankan warga sipil lainnya, dapat ditemukan di seluruh dunia. Istilah yang sering dipakai adalah *Unarmed Civilian Protection* (UCP, pengamanan warga sipil tak bersenjata) atau *Unarmed Civilian Accompaniment* (pendampingan warga sipil tanpa senjata).

<sup>1</sup> Amnesty, “*Human rights activists being ‘swept out’ of Aceh*,” 6 Maret 2000.

<sup>2</sup> Peace Brigades International, “*Our work in Indonesia 1999-2011*,” 2011.

UCP adalah praktik di mana warga sipil tak bersenjata menyediakan pengamanan fisik langsung kepada warga sipil lainnya menggunakan aksi nirkekerasan. Alih-alih mengandalkan senjata dan ancaman kekerasan, praktisi UCP memanfaatkan kehadiran (*physical presence* dan *visibility*), jejaring, penerimaan oleh komunitas setempat, dan hubungan proaktif (*proactive engagement*) guna melindungi warga sipil. Terkadang, hanya dengan *ngobrol*, para relawan dapat meyakinkan pihak-pihak dalam konflik untuk tidak melukai warga sipil.

Di Filipina, tim UCP dari lembaga Nonviolent Peaceforce (NP) beberapa kali mengintervensi situasi di mana warga sipil terjebak di tengah kontak senjata antara pemerintah dan pemberontak. Dengan merengkuh kedua pihak, NP berhasil menegosiasikan gencatan senjata sementara—terkadang hanya 30 menit—dan memanfaatkan kesempatan tersebut guna mememani warga sipil pindah ke daerah yang lebih aman. Di Ukraina, model pendampingan NP dan hubungan yang dibangun dengan polisi memungkinkan warga sipil melalui titik-titik cegatan (*check points*) tanpa gangguan atau interogasi berlebihan. Dalam kedua kasus, pihak-pihak bersenjata tidak pernah secara sengaja ingin melukai warga sipil. Kita sudah terbiasa mendengar berita seputar brutalitas polisi, penembakan massal, pemerkosaan, dan genosida, dan karenanya sering lupa bahwa melukai warga sipil umumnya bukan tujuan utama pihak-pihak konflik, sehingga bisa dicegah dengan *proactive and constructive engagement*. Ini pintu masuk sering diambil oleh praktisi UCP karena tidak mensyaratkan konfrontasi dengan aktor-aktor bersenjata. Begitu praktisi UCP dipercaya oleh pihak-pihak kunci dalam konflik serta memiliki jaringan dan reputasi yang baik, mereka bisa memberi lebih banyak tekanan seputar pencegahan kekerasan.

Tapi, apa yang bisa dilakukan jika para pelaku kekerasan tidak peduli akan keselamatan warga sipil, atau bahkan punya tujuan melukai warga sipil? Tentu, UCP menjadi sulit dipraktikkan, tetapi bukannya tidak mungkin. Satu cara yang biasa ditempuh adalah menyelami sensitivitas, sumber kekuasaan, dan daya tekan pihak-pihak dalam konflik, lalu memanfaatkannya. Beberapa pihak mungkin khawatir akan reputasi mereka di mata masyarakat; beberapa yang lain mungkin khawatir dituduh melanggar HAM sehingga ke depannya sulit mengejar karir politik, panggung internasional, atau pendanaan tertentu; beberapa mungkin tidak nyaman berhadapan langsung dengan penyintas kekerasan sehingga sama sekali menghindar dari isu ini. Tim UCP di Myanmar sering menemui situasi di mana kepala polisi atau komandan militer tidak mau diajak bicara soal warga sipil yang ditahan. Dengan memobilisasi bantuan para biksu, Tim UCP akhirnya mendapatkan akses kepada sang komandan saat yang bersangkutan berdoa di di kuil.

Satu pendekatan pengamanan biasanya tidak cukup. Sering kali, praktisi UCP harus mengetuk banyak pintu dan jendela sebelum menemukan celah masuk. Itupun tidak selalu berhasil. Tetapi mereka tidak pernah berhenti mencoba. Cukup sering praktisi UCP terkejut sendiri dengan pencapaian yang tadinya mereka pikir tidak mungkin. Bahkan, saat gagal mencegah tindak kekerasan pun, para praktisi UCP berkontribusi besar terhadap kondisi para warga sipil di tengah konflik. Ada kekuatan yang muncul saat mendampingi mereka yang terdampak

kekerasan, dalam solidaritas dan kemanusiaan. Relawan asing yang jauh-jauh datang dari negara yang aman guna kebersamai warga sipil di wilayah konflik, di sebuah *bunker* saat roket meledakkan kota tersebut, tentu membangun keterikatan kuat dengan warga setempat. Di sini, “tidak bersenjata” bukan berarti “tidak punya pengaruh” atau “tidak berdaya.”

Siapa yang bisa mempraktikkan UCP? Semua! Di mana UCP dipraktikkan? Di mana saja! UCP telah dipraktikkan di berbagai konteks, dari konflik komunal di Sudan Selatan hingga kekerasan militer di Myanmar, dari garis depan perang Rusia-Ukraina hingga perang berintensitas rendah di Thailand Selatan, dari pelosok desa di Darfur hingga area perkotaan di Amerika Serikat di mana penembakan massal sering terjadi. UCP dipraktikkan baik oleh komunitas yang berada di garis depan konflik maupun oleh organisasi-organisasi seperti NP dan PBI. Penelitian Selkirk College memperkirakan ada lebih dari 60 organisasi yang secara aktif bekerja di bidang UCP. Ini belum menghitung begitu banyaknya inisiatif UCP di tingkat komunitas. Di Sudan Selatan saja, terdapat 67 Women Protection Team (tim pengaman yang seluruh anggotanya perempuan) yang aktif beroperasi di tahun 2021, dengan 2.500 perempuan muda dan dewasa yang dilatih teknik-teknik UCP.<sup>3</sup>

UCP mengandalkan strategi dan taktik nirkekerasan (*nonviolent action*) tetapi tidak sama dengan dengan perlawanan nirkekerasan (*civil resistance*). Kebanyakan praktisi UCP tidak memusatkan kerja mereka pada mendisrupsi atau mempertahankan status quo. Mereka tidak mengorganisir protes, pawai, demonstrasi, atau menantang diktator. Fokus mereka adalah memonitor keselamatan warga sipil yang ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya dengan mendorong polisi atau mendorong pemimpin gerakan memastikan langkah-langkah pengamanan yang nirkekerasan. Penting dicatat bahwa beberapa organisasi UCP juga mendukung gerakan-gerakan perlawanan nirkekerasan. Di Amerika Serikat misalnya, NP dengan DC Peace Teams-nya, menyediakan *protective presence* (pengamanan fisik, dengan menjadi pagar betis), di mana mereka keluar dan masuk kerumunan guna mendampingi demonstran maupun warga sipil lain (*bystanders*) saat dibutuhkan, sembari memonitor potensi kekerasan polisi dan mencegah gangguan dari publik terhadap para demonstran.

Bagi banyak praktisi, UCP lebih dari sekadar alternatif tak bersenjata terhadap langkah-langkah pengamanan. Ini membutuhkan pergeseran pola pikir seputar keamanan—dan lebih jauh lagi, perubahan cara memandang dunia. Di era modern ini, kita dibuat percaya bahwa satu-satunya cara menghadirkan rasa aman adalah dengan menjauhkan diri dari pihak atau hal yang mengancam kita. Cara pandang ini menuntut kita mengakumulasi kekuatan fisik atau kemajuan teknologi hingga mengungguli lawan. Kita juga dituntut memenjarakan mereka atau membangun tembok yang mengisolasi “kita” dari “mereka.” Apapun itu, langkah kita mengamankan diri dilandaskan pada keterputusan: tembok, pagar, kawat berduri, sel penjara, perbatasan, pengusiran, kematian, dan lain-lain. Kita dipaksa mengandalkan teknologi, bukan hubungan antarmanusia. Dr. Martin Luther King menyebut ini “*our thing-oriented civilization*” (peradaban berorientasi barang, bukan berorientasi manusia). Meski mungkin bisa dipakai

---

<sup>3</sup> Nonviolent Peaceforce, “*Unarmed Civilian Protection: An Introduction*,” 2022.

guna membatasi pembunuh berantai (*serial killers*), cara pandang ini sangat terbatas, tidak ada imajinasi dan kreativitas soal keamanan. Ini menguntungkan segelintir orang saja, di mana mereka yang punya privilese tertentu bisa “menikmati” keamanan dengan memisahkan diri dari kelompok lain yang mereka dehumanisasi. Sudah terbukti di banyak tempat bahwa logika ini tidak berdasar. Apartheid dan genosida Israel di Gaza adalah salah satu contoh terkini soal betapa delusionalnya membangun keamanan dengan menyingkirkan mereka yang dianggap mengancam hidup kita. Kalaupun ada, rasa aman yang muncul tidak mungkin berkelanjutan. Perang dan teknologi militer telah mencekik planet ini dan mempercepat kerusakan dan krisis iklim. Sampai berapa lama lagi mereka yang kaya dan kuat bisa hidup di benua-benua yang aman, ketika hutan hujan dibabat dan gunung es dibiarkan mencair? Keamanan macam apa ini?

Praktisi UCP menantang cara pandang dominan seputar keamanan dan menunjukkan bagaimana pengamanan dapat dibangun dengan cara-cara yang lebih bermakna, melalui hubungan dan kedekatan dengan pihak-pihak yang selama ini ditakuti. UCP adalah model keamanan yang didasarkan pada hubungan. Di sini, hubungan yang paling dangkal atau permukaan sekalipun membuat agresi terhadap orang lain semakin sulit—sama halnya, mengumpat di jalan raya menjadi lebih sulit begitu kita bertatap mata dengan pengemudi lain, apalagi jika kita mengenalnya.

Alih-alih mengandalkan kerahasiaan, praktisi UCP mengedepankan transparansi dan keterbukaan guna melindungi diri dan mencapai tujuan. Para relawan PBI di Indonesia memastikan supaya pergerakan mereka diketahui aparat keamanan. Terkadang, mereka juga meminta dukungan aparat keamanan dalam melakukan pendampingan keamanan, meski mereka menduga aparat yang bersangkutan merupakan salah satu sumber ketidakamanan warga sipil. Dengan melakukan ini, para relawan mengingatkan aparat keamanan akan kewajiban mereka melindungi warga sipil, mengurangi kemungkinan aparat keamanan mengancam warga sipil, dan memastikan aparat keamanan tidak menutup-nutupi potensi penyerangan terhadap warga sipil.

Aspek lain dari model keamanan yang dilandaskan pada hubungan adalah kemampuan memisahkan tindak kekerasan dari pelaku kekerasan, serta memperluas keterlibatan aktor dalam langkah pengamanan. Dalam UCP, semua orang punya kemampuan menjadi pelindung, semua orang punya peran untuk dimainkan. Demokratisasi proses penyediaan keamanan adalah hal penting, apalagi di tengah melemahnya perangkat HAM dan hukum humaniter internasional, di mana komunitas di Gaza, Myanmar, Darfur, dan lainnya tidak dapat mengandalkan siapapun untuk menyediakan keamanan bagi mereka.

Menanggapi meningkatnya kebutuhan keamanan dan melemahnya sistem pengamanan yang ada, para praktisi UCP merapatkan barisan. Pada bulan Oktober tahun 2023, 86 praktisi, mitra, dan peneliti UCP dari 31 negara berkumpul dan mendirikan komunitas global,<sup>4</sup> serta menjadikan praktik UCP lebih mudah diakses oleh komunitas yang terdampak kekerasan. Dengan mengembangkan diskusi yang kritis, berbagi sumber daya, dan saling membandingkan analisis, komunitas UCP global ini saling menginspirasi dan memicu satu sama lain membuka ruang-ruang inovasi.

Lebih penting lagi, ada kebutuhan mendesak untuk merapatkan barisan di tengah meningkatnya otoritarianisme, perang, dan krisis iklim. Sebagaimana dikatakan oleh penulis dan aktivis Naomi Klein, "Kita sedang berada di mata pisau dan karena membutuhkan satu sama lain... Kita ada di masa di mana kita tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Kita hanya bisa melalui semua ini dengan membangun koalisi sekuat dan seluas mungkin."<sup>5</sup> Kita bisa sibuk mempertanyakan efektivitas pendekatan nirkekerasan dalam mewujudkan keamanan serta menggaris-bawahi tempat-tempat di mana nirkekerasan dianggap gagal. Kita bisa juga sibuk berteriak dan mengeluh di dunia siber. Bagaimanapun, ini bukan waktunya terdistraksi oleh debat intelektual ataupun waktunya menyerah. Ini waktunya kita bangkit, terhubung satu sama lain, serta bergerak bersama. Mulai dari posisi masing-masing, belajar, dan berbagi. Pada akhirnya, UCP adalah soal aksi nyata membuat warga sipil merasa lebih aman—di manapun mereka dan mulai saat ini!

Inilah yang dilakukan warga Arab dan Yahudi di Israel setelah 7 Oktober 2023. Mereka keluar dari lingkaran masing-masing, lalu bersama-sama mempraktikkan UCP di Jaffa. NBC News memberitakan secara terperinci bagaimana mereka menginisiasi pengamanan tak bersenjata guna memastikan warga sipil tidak ditahan oleh aparat keamanan Israel, sebagaimana terjadi pada episode-episode kekerasan sebelumnya antara Israel dengan Hamas.<sup>6</sup> Mereka menemani warga Israel, baik yang Arab maupun Yahudi, yang takut bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga mengirim kebutuhan pokok bagi warga sipil yang terusir dari rumahnya, serta mengirim relawan guna melaporkan insiden-insiden kekerasan yang dialami warga sipil. Inisiatif ini menunjukkan betapa UCP dapat dilakukan di mana saja—bahkan di tengah kekerasan ekstrem—dan memungkinkan warga sipil merebut kembali agensinya dari pihak-pihak bersenjata. Sangat bisa jadi, akan tiba saatnya di mana UCP bukan sekadar ide radikal dan diterima sebagai sesuatu yang masuk akal.

---

4 "Unarmed Civilian Protection/Accompaniment Community of Practice," UCP/A Community of Practice, diakses pada 10 Desember 2024.

5 Novara Media, "Naomi Klein on Steve Bannon, The Failures Of The Left and her Doppelgänger," video podcast, Youtube, 1:08.

6 Alexander Smith, "A group of Jews and Arabs in Israel has a 'radical' idea — protecting one another as fear reigns," NBC News, 27 Oktober 2023.



pe

## **Chaiwat Satha-Anand & Misi Mustahilnya**

*Chayanit Poonyarat,<sup>1</sup> diterjemahkan oleh diah kusumaningrum*

“Konflik penting untuk menghadirkan perubahan.  
Karenanya, kita perlu hati-hati supaya kekerasan tidak merusak konflik.”  
(Professor Dr. Chaiwat Satha-Anand)

Mendiang Prof. Dr. Chaiwat Satha-Anand dikenal di Thailand dan secara internasional sebagai akademisi di bidang perdamaian yang aktif mempromosikan ide-ide nirkekerasan. Sepanjang hidupnya, Chaiwat konsisten membongkar mispersepsi dan mitos seputar konflik dan kekerasan sembari menawarkan alternatif-alternatif nirkekerasan. Ia adalah pendiri dan mantan direktur Peace Information Center (Pusat Informasi Perdamaian) di Thailand serta pernah menjabat sebagai Ketua Strategic Nonviolence Commission (Komisi Nirkekerasan Strategis) di Thailand. Chaiwat juga terlibat dalam beberapa organisasi perdamaian dan nirkekerasan di tingkat global. Selama beberapa tahun, ia memimpin komisi nirkekerasan di bawah International Peace Research Association dan menjadi anggota komite keilmuan di bawah International University for People's Initiative for Peace di Rovereto, Italia. Chaiwat dinobatkan oleh Dewan Riset Nasional sebagai peneliti terbaik Thailand 2006 di bidang studi politik dan administrasi publik. Ia juga menerima National Sri Burapha Distinguished Writer Award di Bangkok dan International El-Hibri Peace Education Prize di Washington D.C. pada tahun 2012.

Meski kontribusinya di bidang studi nirkekerasan sudah banyak diketahui umum, banyak yang kurang tahu penilaian Chaiwat terhadap rekam jejaknya sendiri. Mereka yang dekat dengan Chaiwat tahu betul bahwa setiap dering “Mission: Impossible” pada ponselnya berbunyi, artinya Chaiwat akan menjalani suatu misi yang mustahil, bisa di jadi di Thailand sendiri, ataupun di belahan dunia lain. Sebagai seorang Muslim, Chaiwat atau Qadeer Muheideen, dikenal bukan hanya atas kontribusi uniknya dalam mengkaji nirkekerasan dari perspektif Islam, tetapi juga atas caranya yang luar biasa dalam mengenalkan nirkekerasan kepada negara. Ini merupakan sebuah antitesis terhadap konsep Weberian yang melihat negara sebagai institusi politik yang secara inheren bersifat kekerasan.

---

<sup>1</sup> Saya mendapat kehormatan untuk mengenal dan bekerja dengan mendiang Prof. Dr. Chaiwat Satha-Anand sejak 1998 sebagai seorang mahasiswa dalam seminar tentang kekerasan dan nirkekerasan di politik yang ia ampu, serta sebagai asisten mahasiswanya di Fakultas Ilmu Politik, Thammasat University. Kami bekerja sama di Peace Information Center selama beberapa tahun sejak saya menjadi dosen di Fakultas Ilmu Politik, Thammasat University. Chaiwat merupakan guru, kolega, dan mentor saya. Kepergiannya bukan hanya kehilangan besar bagi dunia akademik, tapi juga sebuah duka yang mendalam bagi saya pribadi.

Melalui aneka publikasi, banyak di antaranya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Mandarin, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Korea, ia menggarisbawahi pandangan Islam mengenai nirkekerasan. Termasuk di antaranya adalah buku *Islam and Nonviolence* (1993), di mana Chaiwat dan mentornya, Glenn D. Paige, mengenalkan kepada dunia keselarasan antara Islam dan nirkekerasan.<sup>2</sup> Buku *The Life of This World: Negotiated Muslim Lives in Thai Society* (2005) berisi kumpulan tulisan Chaiwat selama dua dekade mengenai kehidupan dan cara pandang kelompok minoritas Muslim di Thailand, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.<sup>3</sup> Dalam *Nonviolence and Islamic Imperatives* (2017), Chaiwat menggunakan kepakarannya di bidang studi nirkekerasan guna menunjukkan kepada para pembaca betapa prinsip nirkekerasan dipraktikkan dalam gerakan-gerakan Islam sepanjang sejarah hingga masa kini.<sup>4</sup> Di dunia yang penuh Islamophobia, Chaiwat mendedikasikan hidupnya untuk meluruskan persepsi bahwa Islam identik dengan kekerasan, serta untuk mengukuhkan bahwa Islam dan nirkekerasan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Selain mendorong perspektif Islam dalam studi nirkekerasan, misi mustahil lain yang diemban Chaiwat adalah mengajari negara soal nirkekerasan, sesuatu di luar nalar para peneliti politik dan membuat kebijakan. Langkah Chaiwat mengenalkan negara pada nirkekerasan dimulai pada tahun 1970an dan 1980an saat ia menempuh studi doktoral di University of Hawai'i, Mānoa. Tergelitik mengkombinasikan studi filsafat politik dan studi nirkekerasan, Chaiwat menulis disertasi mengenai *The Nonviolent Prince* (Pangeran Nirkekerasan), sebagai tandingan dari *The Prince* karya Niccolò Machiavelli. Tulisan abad ke-16 tersebut sering diinterpretasikan sebagai pedoman menavigasi bengisnya kekuasaan dan dominasi. Di tangan Chaiwat, tulisan itu diinterpretasi ulang dengan mengeksplorasi keutamaan nirkekerasan dalam politik, dengan argumen bahwa pemerintahan sangat mungkin dijalankan tanpa kekerasan fisik.<sup>5</sup>

Setelah lulus, Chaiwat kembali mengajar di Fakultas Ilmu Politik, Thammasat University, di mana pada 1988 ia mendirikan lembaga pendidikan perdamaian pertama di Thailand, Peace Information Center. Lembaga ini mengaktualisasi ide-ide Chaiwat mengelola konflik dan kekerasan, menggunakan ilmu pengetahuan seputar nirkekerasan. Sebagai dosen Thammasat University serta sebagai direktur Peace Information Center, Chaiwat sering menyuarakan kesadaran dan nurani masyarakat, terutama saat Thailand dilanda konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Yakin bahwa pemerintahan bisa dijalankan tanpa kekerasan, pada tahun 2001, Chaiwat menginisiasi Strategic Nonviolence Commission di bawah Dewan Keamanan Nasional Thailand. Komisi yang dibentuk di bawah mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sebelum ia dikudeta ini merupakan institusionalisasi perencanaan strategis kebijakan nirkekerasan di sektor keamanan, dengan tujuan "memonitor, membaca situasi, membuat peringatan, serta membuat rekomendasi resolusi konflik secara nirkekerasan untuk

2 Glenn D. Paige, Chaiwat Satha-Anand, dan Sarah Gilliatt (Eds.), *Islam and Nonviolence* (Honolulu: Center for Global Nonviolence, 1993).

3 Chaiwat Satha-Anand, *The Life of This World: Negotiated Muslim Lives in Thai Society* (Singapore: Marshall Cavendish International, 2005).

4 Chaiwat Satha-Anand, *Nonviolence and Islamic Imperatives* (Sparsnäs, Sweden: Irene Publishing, 2017).

5 Lihat Chaiwat Satha-Anand, *The Nonviolent Prince* (Disertasi yang diserahkan ke Departemen Ilmu Politik, University of Hawai'i di Mānoa, 1982).

pemerintah dan masyarakat Thailand.<sup>6</sup> Komisi ini, yang terdiri atas pakar dari kalangan warga sipil dan aparat keamanan negara, tidak hanya menelurkan kebijakan keamanan nasional, tetapi juga mendorong dialog, termasuk yang bersifat informal, antar berbagai aktor untuk mengelola konflik,<sup>7</sup> baik konflik sumber daya, konflik antara kelompok “kaus kuning” pro-kerajaan dan kelompok “kaus merah” pro-Thaksin, serta konflik pemisahan diri yang memakan banyak korban di provinsi bagian selatan.

Salah satu hasil penting komisi ini adalah Perintah Perdana Menteri nomor 187/2546 yang “memandatkan semua lembaga pemerintah untuk memprioritaskan resolusi konflik secara nirkekerasan” guna “memperkuat dan memulihkan hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda serta antara negara dan rakyat secara nirkekerasan.”<sup>8</sup> Juga, komisi ini mengeluarkan kebijakan keamanan nasional 1999 yang merekognisi minoritas Muslim Melayu di bagian selatan sebagai “kelompok dengan budayanya sendiri” yang berhak “hidup sebagai Muslim seutuhnya,”<sup>9</sup> alih-alih sebagai kelompok yang perlu diasimilasikan oleh negara. Komisi ini juga sukses menginisiasi negosiasi rahasia antara pemerintah Thailand dengan kelompok Melayu yang ingin memisahkan diri.<sup>10</sup> Akan tetapi, karena berbagai kompleksitas, kekerasan kembali muncul di 2004. Ini menjadi dalih bagi kelompok garis keras dalam militer untuk menguasai kembali setor keamanan, sehingga Strategic Nonviolence Commission pun dibubarkan pada tahun 2008. Komisi ini sedang dibangun ulang sebagai *think tank* di bawah Dana Penelitian Thailand serta terus memonitor dan memberi rekomendasi kepada lembaga-lembaga negara dan masyarakat Thailand mengenai tantangan-tantangan nasional, termasuk soal gerakan pemisahan diri dan konflik politik.<sup>11</sup>

Pada tahun 2005, setahun setelah meletusnya kembali kekerasan di Thailand Selatan, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menunjuk 50 warga dari berbagai sektor, termasuk Chaiwat, untuk membuat National Reconciliation Commission (Komisi Rekonsiliasi Nasional). Seorang diri, Chaiwat menyiapkan naskah pertama laporan komisi ini. Menggunakan segitiga kekerasan Galtung, ia menjabarkan bahwa kekerasan di wilayah yang populasinya mayoritas adalah Muslim-Melayu berakar dari beberapa aspek struktural dan kultural. Laporan itu mengajukan beberapa usulan kebijakan nirkekerasan yang inovatif, baik yang bisa langsung diterapkan maupun yang membutuhkan penanganan lebih dalam, di tingkat struktural dan kultural. Salah satu rekomendasi tersebut, antara lain, adalah membentuk Shanti Sena, atau pasukan perdamaian tak bersenjata guna menjalankan operasi binadamai; mengelola sumber daya alam dan sistem peradilan melalui amandemen legislasi; memperkuat sistem hukum Islam di Thailand selatan; menyatakan Pattani Melayu sebagai bahasa resmi di Thailand selatan; serta

6 Danai Moosa, “Santiwitee nai miti ngarn kwam munkong thai” (Nonviolence in the Thai security sector) (dalam bahasa Thai) in Chaiwat Satha-Anand, ed. *Nonviolence Space Thailand Future: Knowledge, Secret, Memory*. (Bangkok: Protestista, 2016): 253.

7 Wawancara dengan Pichai Rattanaphon, mantan ketua Komisi Nirkekerasan Strategis dan wakil sekretaris Dewan Keamanan Nasional, pada tanggal 3 Mei 2023.

8 Perintah Perdana Menteri 187/B.E.2546 tentang “Kebijakan penyelesaian konflik secara nirkekerasan” (dalam bahasa Thai).

9 Office of the National Security Council, “Nayobai khwam mankhong haeng chat kiewkub changwat chaidan phak tai B.E.2542-2546” (National security policy on the southern province, 1999-2003) (dalam bahasa Thai).

10 Wawancara dengan Pichai Rattanaphon.

11 Prachatai, “*Yudtitham pue santipab talaeng kudkan rut yokluek kanakammakan yuttasat santiwiti*” (“Justice for Peace” opposes the dissolution of “Strategic Nonviolence Commission”) (dalam bahasa Thai), 27 Oktober 2008.

mempromosikan nirkekerasan sebagai pendekatan utama menyelesaikan konflik baik di Thailand selatan maupun di seluruh negeri.<sup>12</sup>

Di atas segalanya, Chaiwat adalah seorang guru yang luar biasa. Ia menginisiasi dan mengajar kelas mengenai kekerasan dan nirkekerasan dalam politik, serta beberapa kelas yang sangat diminati mahasiswa, selama tiga dekade. Saat saya berkuliah S-1 di Thammasat University, saya sangat beruntung belajar di kelas ini, di mana banyak pesertanya bukan mahasiswa Ilmu Politik maupun mahasiswa Thammasat University. Hampir semua orang tahu bahwa kelas Chaiwat sangat sering dihadiri banyak orang dari berbagai latar belakang, termasuk yang sudah S-2 maupun yang tidak berstatus mahasiswa sama sekali. Inilah mengapa mereka yang menganggap diri mereka "murid Chaiwat" tidak terbatas pada mahasiswa Ilmu Politik maupun mahasiswa Thammasat University.

Pada tahun 2006, Chaiwat menerima penghargaan Kiratiyajaraya Distinguished Professor yang diberikan Thammasat University "untuk menghormati pengajar dengan moral, pengetahuan, serta kemampuan luar biasa mendedikasikan dirinya untuk mengajar, meneliti, serta mengabdikan kepada masyarakat."<sup>13</sup> Saat saya diangkat menjadi dosen di Thammasat University, Chaiwat memberi saya dua pelajaran berharga. Menurutnya, di satu sisi, "semua aktivisme sosial saya harus didasarkan dan dituntun oleh ilmu pengetahuan." Lalu di sisi lain, "kehidupan akademik membuka kesempatan bergabung dengan proyek-proyek menarik, di mana kita harus memprioritaskan mengajar dan komitmen kita pada mahasiswa, terlepas dari proyek lain." Sepanjang karir mengajarnya, kelas Chaiwat hampir tidak pernah kosong meski ia memiliki jadwal yang sangat padat. Saat menjadi asisten di Peace Information Center, saya ingat betul bagaimana mahasiswa maupun warga umum mengantre di depan kantor Chaiwat guna meminta nasihatnya seputar persoalan akademik dan persoalan pribadi, dan Chaiwat selalu punya waktu untuk para tamunya, kadang hingga larut malam. Ini semua adalah pelajaran dan inspirasi yang saya kenang hingga hari ini.

"Lebih dari segala pencapaian itu, Chaiwat adalah manusia luar biasa yang menghidupi nirkekerasan sebagai jalan hidup... Ia manusia yang luar biasa, halus, welas asih, dan penyayang."<sup>14</sup> Ia bisa melihat sisi baik semua orang serta selalu memperlakukan semua orang dengan penuh hormat dan pengertian. Chaiwat berpulang pada 17 Juni 2024 pagi hari, ditemani keluarga dan teman-temannya. Pemakamannya di Masjid Haroon berbeda dari umumnya karena dihadiri ratusan orang dari segala sudut kehidupan, yang dekat dan jauh, dengan aneka latar belakang agama dan budaya. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengirimkan pesan pribadi, "Meski saya harus melepas jiwa yang luar biasa ini, saya merasa tenang karena

---

<sup>12</sup> Lihat National Reconciliation Commission, *Overcoming Violence through the Power of Reconciliation: Report of the National Reconciliation Commission* (Bangkok: National Reconciliation Commission, 2006).

<sup>13</sup> Prachathai, "The 2006 Kiratiyajaraya Distinguished Professor Keynote Speech: 'Chaiwat Satha-Anand' Stop Terrorism by Becoming 'Muslim Nonviolent Warrior'." (Pathakatha Kiratiyajaraya B.E. 2549: "Chaiwat Satha-Anand" yoot kor karn rai duay karn pen "nak rob muslim santi wathi") (dalam bahasa Thai), 7 Juli 2006.

<sup>14</sup> Ini merupakan kata-kata yang ditulis langsung oleh Direktur Toda Peace Institute, Kevin P. Clements, dalam "Obituary: Professor Chaiwat Satha-Anand." Saya tidak bisa menulis sebuah pernyataan yang lebih baik dan seindah pernyataan tersebut, sehingga saya kutip di sini. Lihat Kevin P. Clements, "Obituary: Professor Chaiwat Satha-Anand", *Toda Institute*, 8 Juli 2024.

ia meninggalkan banyak warisan. Semoga kenangan mengenainya selalu menginspirasi kita mengambil jalan perdamaian, mencari saling pengertian di tengah pertentangan, serta membangun dunia di mana harmoni dan rasa hormat menang.”<sup>15</sup>

Mari kita merayakan kehidupan Chaiwat tercinta dengan meneruskan kerja mulianya untuk Thailand yang nirkekerasan di tengah dunia yang nirkekerasan.

---

<sup>15</sup>Anwar Ibrahim, *Facebook*, 28 Juni 2024.

## METODE-METODE PROTES DAN PERSUASI

- #1 Public Speeches**  
Pidato di Hadapan Publik
- #2 Letters of Opposition or Support**  
Mengirim Surat Penolakan atau Dukungan
- #3 Declarations by Organizations and Institutions**  
Deklarasi oleh Organisasi dan Institusi
- #4 Signed Public Statements**  
Pernyataan Publik yang Ditandatangani
- #5 Declarations of Indictment and Intention**  
Deklarasi berisi Dakwaan dan Seruan
- #6 Group or Mass Petitions**  
Petisi oleh Kelompok atau Massa
- #7 Slogans, Caricature, and Symbols**  
Slogan, Karikatur, dan Simbol
- #8 Banners, Posters, and Displayed Communications**  
Spanduk, Poster, dan Komunikasi Visual
- #9 Leaflets, Pamphlets and Books**  
Selebaran, Pamflet, dan Buku
- #10 Newspapers and Journals**  
Surat Kabar dan Jurnal
- #11 Records, Radio and Television**  
Album Rekaman, Radio, dan Televisi
- #12 Skywriting and Earthwriting**  
Menulis di Langit dan Tanah
- #13 Deputations**  
Mengirimkan Perwakilan
- #14 Mock Awards**  
Penghargaan Lancung
- #15 Group Lobbying**  
Lobi Kelompok
- #16 Picketing**  
Piket
- #17 Mock Elections**  
Pemilu Lancung
- #18 Displays of Flags and Symbolic Colors**  
Bendera dan Warna Simbolis
- #19 Wearing of Symbols**  
Mengenakan Simbol
- #20 Prayers and Worship**  
Doa dan Peribadatan
- #21 Delivering Symbolic Objects**  
Mempersembahkan Barang Simbolis
- #22 Protest Disrobings**  
Protes dengan Melepas Pakaian
- #23 Destruction of Own Property**  
Merusak Barang Milik Sendiri
- #24 Symbolic Lights**  
Cahaya Simbolis
- #25 Displays of Portrait**  
Memajang Potret
- #26 Paint as Protest**  
Menggunakan Cat sebagai Alat Protes

- #27 New Signs and Names**  
Memasang Nama dan Penanda Jalan yang Baru
- #28 Symbolic Sounds**  
Bunyi-bunyian Simbolis
- #29 Symbolic Reclamation**  
Reklamasi Simbolis
- #30 Rude Gestures**  
Perilaku Kasar
- #31 "Haunting" Officials**  
"Menghantui" Pejabat
- #32 Taunting Officials**  
Menghina Pejabat
- #33 Fraternization**  
Berkawan dengan Lawan
- #34 Vigils**  
Bertirakat
- #35 Humorous Skits and Pranks**  
Lawak dan Lelucon
- #36 Performances of Plays and Music**  
Pertunjukan Seni Peran dan Musik
- #37 Singing**  
Menyanyi
- #38 Marches**  
Berjalan dalam Barisan
- #39 Parades**  
Pawai atau Arak-arakan
- #40 Religious Processions**  
Prosesi Keagamaan
- #41 Pilgrimages**  
Ziarah
- #42 Motorcades**  
Iring-iringan Kendaraan Bermotor
- #43 Political Mourning**  
Perkabungan Politik
- #44 Mock Funerals**  
Pemakaman Lancung
- #45 Demonstrative Funerals**  
Pemakaman Demonstratif
- #46 Homage at Burial Places**  
Penghormatan di Tempat Pemakaman
- #47 Assemblies of Protest or Support**  
Unjuk Rasa atau Demonstrasi
- #48 Protest Meetings**  
Pertemuan Protes
- #49 Camouflaged Meetings of Protest**  
Pertemuan Protes Terselubung
- #50 Teach-ins**  
Ikut Mengajar
- #51 Walkouts**  
Keluar Meninggalkan Acara
- #52 Silence**  
Aksi Diam
- #53 Renouncing Honors**  
Mengembalikan Penghargaan
- #54 Turning One's Back**  
Memunggungungi

## METODE-METODE NONKOOPERASI

- #55 Social Boycott**  
Pengucilan
- #56 Selective Social Boycott**  
Pengucilan Selektif
- #57 Lysistratic Nonaction**  
Menolak Keintiman
- #58 Excommunication**  
Ekskomunikasi
- #59 Interdict**  
Menghentikan Layanan Kerohanian
- #60 Suspension of Social and Sports Activities**  
Menangguhkan Kegiatan Sosial dan Olahraga
- #61 Boycott of Social Affairs**  
Boikot Acara Sosial
- #62 Student Strike**  
Pemogokan Pelajar
- #63 Social Disobedience**  
Pembangkangan Sosial
- #64 Withdrawal from Social Institutions**  
Menarik Diri dari Institusi Sosial
- #65 Stay-at-home**  
Menetap di Rumah
- #66 Total Personal Noncooperation**  
Nonkooperasi Penuh oleh Individu
- #67 "Flight" of Workers**  
Kepergian Pekerja
- #68 Sanctuary**  
Mencari Suaka
- #69 Collective Disappearance**  
Menghilang Bersama
- #70 Protest Emigration (Hijrah)**  
Hijrah
- #71 Consumers' Boycott**  
Boikot oleh Konsumen
- #72 Nonconsumption of Boycotted Goods**  
Tidak Mengonsumsi Barang yang Diboikot
- #73 Policy of Austerity**  
Memilih Kesahajaan
- #74 Rent Withholding**  
Menangguhkan Membayar Sewa
- #75 Refusal to Rent**  
Menolak Menyewa
- #76 National Consumers' Boycott**  
Boikot Konsumen di Tingkat Nasional
- #77 International Consumers' Boycott**  
Boikot Konsumen di Tingkat Internasional
- #78 Workmen's Boycott**  
Boikot Alat Kerja
- #79 Producers' Boycott**  
Boikot oleh Produsen
- #80 Suppliers' and Handlers' Boycott**  
Boikot oleh Perantara
- #81 Traders' Boycott**  
Boikot oleh Pedagang

- #82 Refusal to Let or Sell Property**  
Menolak Menyewakan atau Menjual Properti Milik Sendiri
- #83 Lockout**  
Mengunci Tempat Produksi
- #84 Refusal of Industrial Assistance**  
Menolak Membantu Kegiatan Industri
- #85 Merchants' "General Strike"**  
Pemogokan Pedagang
- #86 Withdrawal of Bank Deposits**  
Menarik Tabungan Bank
- #87 Refusal to Pay Fees, Dues and Assessment**  
Menolak Membayar Ongkos dan Iuran
- #88 Refusal to Pay Debts or Interest**  
Menolak Membayar Hutang atau Bunga
- #89 Severance of Funds and Credit**  
Memotong Sumber Dana
- #90 Revenue Refusal**  
Menolak Berkontribusi terhadap Pendapatan Negara
- #91 Refusal of a Government's Money**  
Menolak Uang yang Dikeluarkan Pemerintah
- #92 Domestic Embargo**  
Pembatasan Barang di Dalam Negeri
- #93 Blacklisting of Traders**  
Pencelakan Pedagang
- #94 International Sellers' Embargo**  
Pembatasan Penjualan Barang ke Negara Tertentu
- #95 International Buyers' Embargo**  
Pembatasan Pembelian Barang dari Negara Tertentu
- #96 International Trade Embargo**  
Pembatasan Jual-Beli Barang dengan Negara Tertentu
- #97 Protest Strike**  
Pemogokan Pekerja
- #98 Quickie Walkout (Lightning Strike)**  
Pemogokan Kilat
- #99 Peasant Strike**  
Pemogokan Buruh Tani
- #100 Farm Workers' Strike**  
Pemogokan Pekerja Perkebunan
- #101 Refusal of Impressed Labor**  
Menolak Kerja Paksa
- #102 Prisoners' Strike**  
Pemogokan Narapidana
- #103 Craft Strike**  
Pemogokan Pengrajin atau Artisan
- #104 Professional Strike**  
Pemogokan Kelompok Profesi
- #105 Establishment Strike**  
Pemogokan Pekerja Seinduk Perusahaan
- #106 Industry Strike**  
Pemogokan Sektor Industri
- #107 Sympathetic Strike**  
Pemogokan Berdasarkan Simpati
- #108 Detailed Strike**  
Pemogokan Beruntun oleh Pekerja dalam Satu Perusahaan
- #109 Bumper Strike**  
Pemogokan Beruntun oleh Kelompok Pekerja dalam Satu Industri
- #110 Slowdown Strike**  
Pemogokan dengan Memperlambat Ritme Kerja
- #111 Working-to-rule Strike**  
Pemogokan dengan Mematuhi Peraturan
- #112 Reporting "Sick" (Sick-in)**  
Berpura-pura Sakit
- #113 Strike by Resignation**  
Pemogokan dengan Mengundurkan Diri
- #114 Limited Strike**  
Pemogokan Terbatas
- #115 Selective Strike**  
Pemogokan Selektif
- #116 Generalized Strike**  
Pemogokan Multisektoral oleh Sebagian Pekerja
- #117 General Strike**  
Pemogokan Multisektoral oleh Sebagian Besar Pekerja
- #118 Hartal**  
Penangguhan Sesaat Kegiatan Ekonomi
- #119 Economic Shutdown**  
Penghentian Total Kegiatan Ekonomi
- #120 Withholding or Withdrawal of Allegiance**  
Menanggukhan atau Menarik Kesetiaan
- #121 Refusal of Public Support**  
Menolak Memberi Dukungan Terbuka
- #122 Literature and Speeches Advocating Resistance**  
Publikasi dan Pidato yang Menyerukan Perlawanan
- #123 Boycott of Legislative Bodies**  
Boikot terhadap Lembaga Legislatif
- #124 Boycott of Elections**  
Boikot terhadap Pemilu
- #125 Boycott of Government Employment and Positions**  
Boikot terhadap Posisi dan Pekerjaan di Lembaga Pemerintahan
- #126 Boycott of Government Department, Agencies and Other Bodies**  
Boikot terhadap Lembaga-Lembaga Pemerintahan
- #127 Withdrawal from Government Educational Institutions**  
Menarik Diri dari Institusi Pendidikan Negeri
- #128 Boycott of Government-supported Organizations**  
Boikot terhadap Organisasi-Organisasi yang Didukung Pemerintah
- #129 Refusal of Assistance to Enforcement Agents**  
Menolak Membantu Aparat Penegak Hukum
- #130 Removal of Own Signs and Placemarks**  
Mencopot Petunjuk dan Penanda Tempat
- #131 Refusal to Accept Appointed Officials**  
Menolak Pejabat yang Ditunjuk
- #132 Refusal to Dissolve Existing Institutions**  
Menolak Membubarkan Institusi
- #133 Reluctant and Slow Compliances**  
Mengikuti Perintah dengan Enggan dan Lamban
- #134 Nonobedience in Absence of Direct Supervision**  
Pembangkangan Saat Tidak Ada Pengawasan
- #135 Popular Nonobedience**  
Pembangkangan Massal oleh Warga
- #136 Disguised Nonobedience**  
Pembangkangan Terselubung
- #137 Refusal of an Assemblage or Meeting to Disperse**  
Menolak Membubarkan Diri
- #138 Sitdown**  
Duduk Menarik Diri
- #139 Noncooperation with Conscription and Deportation**  
Menolak Mendukung Wajib Militer dan Kebijakan Deportasi
- #140 Hiding, Escape and False Identities**  
Bersembunyi, Lari, dan Menggunakan Identitas Palsu
- #141 Civil Disobedience of "Illegitimate" Laws**  
Pembangkangan Sipil terhadap "Aturan Hukum yang Tak Berdasar"
- #142 Selective Refusal of Assistance by Government Aides**  
Pembangkangan Selektif oleh Pegawai Pemerintah
- #143 Blocking of Lines of Command and Information**  
Memblokade Jalur Komando dan Informasi
- #144 Stalling and Obstruction**  
Memperlambat atau Menghalangi Pekerjaan Sendiri
- #145 General Administrative Noncooperation**  
Pembangkangan Massal oleh Pegawai Pemerintah
- #146 Judicial noncooperation**  
Pembangkangan oleh Lembaga Yudikatif
- #147 Deliberate Inefficiency and Selective Noncooperation by Enforcement Agents**  
Kinerja yang Tidak Efisien dan Pembangkangan Selektif oleh Aparat Penegak Hukum
- #148 Mutiny**  
Pembelotan oleh Polisi atau Tentara
- #149 Quasi-Legal Evasions and Delays**  
Membuat atau Memanfaatkan Aturan guna Menghindar atau Memperlambat Proses
- #150 Noncooperation by Constituent Governmental Units**  
Pembangkangan oleh Unit-Unit Pemerintahan

- #150 Noncooperation by Constituent Governmental Units**  
Pembangkangan oleh Unit-Unit Pemerintahan
- #151 Changes in Diplomatic and Other Representation**  
Mengubah Perwakilan Diplomatik dan Lainnya
- #152 Delay and Cancellation of Diplomatic Events**  
Menunda atau Membatalkan Acara Diplomatik
- #153 Withholding of Diplomatic Recognition**  
Menangguhkan Pengakuan Diplomatik
- #154 Severance of Diplomatic Relations**  
Memotong Hubungan Diplomatik
- #155 Withdrawal from International Organization**  
Mengundurkan Diri dari Organisasi Internasional
- #156 Refusal of Membership in International Bodies**  
Menolak Keanggotaan di Badan Internasional
- #157 Expulsion from International Organization**  
Memecat Keanggotaan Organisasi Internasional
- METODE-METODE INTERVENSI**
- #158 Self-Exposure to the Elements**  
Membuat Diri Terpapar Bahaya
- #159 The Fast**  
Berppuasa atau Mogok Makan
- #160 Reverse Trial**  
Pengadilan "Terbalik"
- #161 Nonviolent Harassment**  
Mengganggu secara Nirkekerasan
- #162 Sit-in**  
Ikut Duduk
- #163 Stand-in**  
Ikut Berdiri
- #164 Ride-in**  
Ikut Menumpang Kendaraan
- #165 Wade-in**  
Ikut Bermain Air
- #166 Mill-in**  
Ikut Lalu-lalang
- #167 Pray-in**  
Ikut Berdoa
- #168 Nonviolent Raids**  
Menyerbu secara Nirkekerasan
- #169 Nonviolent Air Raids**  
Menyerbu Udara secara Nirkekerasan
- #170 Nonviolent Invasion**  
Menerobos secara Nirkekerasan
- #171 Nonviolent Interjection**  
Mengadang secara Nirkekerasan
- #172 Nonviolent Obstruction**  
Memblokade secara Nirkekerasan
- #173 Nonviolent Occupation**  
Menduduki secara Nirkekerasan
- #174 Establishing New Social Patterns**  
Menetapkan Pola Sosial Baru
- #175 Overloading of Facilities**  
Memberi Beban Berlebih kepada Fasilitas Umum
- #176 Stall-in**  
Ikut Memperlambat Proses
- #177 Speak-in**  
Ikut Bicara
- #178 Guerrilla Theater**  
Teater Gerilya
- #179 Alternative Social Institutions**  
Membangun Institusi-Institusi Sosial Alternatif
- #180 Alternative Communication System**  
Membangun Sistem Komunikasi Alternatif
- #181 Reverse Strike**  
Pemogokan "Terbalik"
- #182 Stay-in Strike**  
Pemogokan dengan Bertahan di Tempat Kerja
- #183 Nonviolent Land Seizure**  
Merampas Tanah secara Nirkekerasan
- #184 Defiance of Blockades**  
Pembangkangan terhadap Blokade
- #185 Politically Motivated Counterfeiting**  
Pemalsuan Bermotif Politik
- #186 Preclusive Purchasing**  
Memorong Pembelian
- #187 Seizure of assets**  
Merampas Aset
- #188 Dumping**  
Menjual Murah
- #189 Selective Patronage**  
Memberikan Dukungan Ekonomi secara Selektif
- #190 Alternative Markets**  
Membangun Pasar Alternatif
- #191 Alternative Transportation System**  
Membangun Sistem Transportasi Alternatif
- #192 Alternative Economic Institutions**  
Membangun Institusi Ekonomi Alternatif
- #193 Overloading of Administrative Systems**  
Memberi Beban Berlebih kepada Sistem Administrasi Pemerintahan
- #194 Disclosing Identities of Secret Agents**  
Membocorkan Identitas Agen Rahasia
- #195 Seeking Imprisonment**  
Meminta Dipenjarakan
- #196 Civil Disobedience of "Neutral" Laws**  
Pembangkangan Sipil terhadap "Aturan Hukum yang Netral"
- #197 Work-on without Collaboration**  
Terus Menjalankan Tugas tanpa Berkolaborasi dengan Lawan
- #198 Dual Sovereignty and Parallel Government**  
Membangun Kedaulatan Ganda dan Pemerintahan Paralel

Sumber:

Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action. Part 2: The Methods of Nonviolent Action* (Bedford: Porter Sargent Publishing, 1973).



## Riwayat Singkat Penulis

**Chayanit Poonyarat** adalah dosen di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Thammasat. Ia mengampu kelas-kelas dan penelitian mengenai konflik dan kekerasan, nasionalisme, serta bina-bangsa. Salah satu area penelitian yang ia tekuni adalah provinsi perbatasan selatan Thailand yang rawan kekerasan, di mana ia juga menjadi Sekretaris Sub-komite Majelis Nasional Thailand tentang Promosi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perdamaian di Provinsi Perbatasan Selatan. Ia juga aktif terlibat dalam gerakan pro-demokrasi yang dipimpin anak-anak muda di Thailand (2020-2023).

**Daniel Petz** adalah dosen tamu di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), Universitas Gadjah Mada. Ia mengampu kelas-kelas mengenai nirkekerasan, transformasi konflik, dan keadilan iklim. Di tim DPD, ia memfokuskan diri pada riset-riset seputar irisan aksi nirkekerasan dengan populisme sayap kanan serta seputar *nonviolent defense*. Ia juga mengembangkan beberapa penelitian di bidang keadilan iklim, manajemen bencana, serta pengungsi (termasuk *internal displacement*). Ia tengah menyelesaikan penulisan buku "Resistance is NOT futile: The philosophy and theories of civil resistance."

**Dhania Salsha Handiani** adalah lulusan Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI), Universitas Gadjah Mada. Ia bekerja sebagai manajer dan peneliti Damai Pangkal Damai, serta asisten peneliti di INKLUSI Fisipol UGM. Ia menulis skripsi mengenai keunggulan strategi nirkekerasan dalam gerakan kemerdekaan Timor Timur, yang kemudian ia presentasikan bersama Dr. Diah Kusumaningrum selaku pembimbingnya di International Studies Association (ISA) Conference 2022 di Nashville, Amerika Serikat.

**Diah Kusumaningrum** adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DIHI) dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK), Universitas Gadjah Mada. Di antara kelas yang ia ampu adalah Pengantar Studi Perdamaian, Studi Nirkekerasan, dan Filsafat Resolusi Konflik. Bersama Ayu Diasti Rahmawati, ia menginisiasi pangkalan data Damai Pangkal Damai pada tahun 2016. Ia memperoleh gelar MA dari University of Bradford, di mana ia menulis disertasi mengenai penggunaan aksi nirkekerasan dalam konflik-konflik vertikal, horizontal, dan sistemik. Untuk disertasinya doktoralnya, ia menulis mengenai rekonsiliasi sehari-hari di Maluku, dan memperoleh gelar dari Rutgers University. Ia menerima Global South Feminist Scholar Award dari International Studies Association (2022-2023).

**Huibert Oldenhuis** adalah *head of global programming* di Nonviolent Peaceforce. Sebelumnya, ia pernah bekerja sebagai *international observer* dan koordinator program pendidikan perdamaian untuk Peace Brigades International di Indonesia, *associate expert* untuk United Nations Regional Center for Peace and Disarmament di Nepal, *international protection officer* Nonviolent Peaceforce di Sudan Selatan, serta *head of mission* dan *program manager* Nonviolent Peaceforce di Myanmar.

## Produk DPD



Infografis Mingguan  
198 Metode  
Aksi Nirkekerasan



Kaleidoskop Bulanan  
Perlawanan Nirkekerasan  
di Indonesia dan Dunia



Refleksi Tahunan  
Perlawanan Nirkekerasan  
di Indonesia dan Dunia



Podcast  
Pekerja Nirkekerasan  
Sehari-hari



Buku Saku  
Aktivisme Nirkekerasan  
[ugm.id/AktivismeNirkekerasan](http://ugm.id/AktivismeNirkekerasan)



Buku Saku  
Jurnalisme Nirkekerasan  
[ugm.id/JurnalismeNirkekerasan](http://ugm.id/JurnalismeNirkekerasan)

DPD adalah penerima dana hibah penelitian DIHI UGM 2016, dana hibah penelitian internasional FISIPOL UGM 2018, Peace Research Grant dari International Peace Research Association Foundation 2020, serta dana hibah hilirisasi penelitian FISIPOL UGM 2021.



damai  
pangkal  
damai

